Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SUMATERA UTARA



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Utara

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1977/1978

PERPUSTAKAAN.
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala
NO. INDUK 2101 b/. Hadiah
TGL. 1 Maret 1984.

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL.
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritra Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selan-

jutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K. di Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH PROPINSI SUMATRA UTARA ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Sumatra Utara.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Medan Propinsi Sumatra Utara.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatra Utara.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sumatra Utara.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sumatra Utara, yang terdiri dari:

1.	P. Payung Bangun M.P.	sebagai Konsultan
2.	Daud Manurung	sebagai Ketua
3.	Anas Machmud	sebagai Sekretaris
4.	Nazief Chatib	sebagai Anggota
5.	Abdul Mukti Lubis	sebagai Anggota
6.	Sanusi	sebagai Anggota

6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari :

–	Konsultan/ Anggota	: 1. Prof. Dr. I.B. Mantra 2. Dr. Astrid S. Susanto 3. Abdurrachman Surjomihardjo. 4. A.B. Lapian
–	Ketua	: Sutrisno Kutoyo
–	Sekretaris	: M. Soenjata Kartadarmadja
–	Anggota	: 1. Anhar Gonggong 2. Mardanas Safwan 3. Masjkuri

4. Surachman
5. Muchtaruddin Ibrahim
6. Sri Sutjiatiningsih.

7. Editor : 1. Anhar Gonggong
2. Sutrisno Kutoyo

8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo
NIP. 130117589.

TIM PELAKSANA/PENYUSUN NASKAH
SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
DAERAH SUMATRA UTARA
1977/1978

1.	DRS. P.P. BANGUN M.A.	– KONSULTAN
2.	DRS. DAUD MANURUNG	– KETUA TIM
3.	DRS. ANAS MAHMUD	– SEKRETARIS TIM
4.	DRS. NAZIEF CHATIB	– ANGGOTA
5.	DRS. ABDUL MUKTI LUBIS	– ANGGOTA
6.	DRS. S A N U S I	– ANGGOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tujuan Penelitian 1
B. Masalah 1
C. Ruang Lingkup 2
D. Pertanggung Jawaban Ilmiah/Prosedur Penelitian 3
E. Hasil Akhir 3

BAB II KEADAAN DI DAERAH SUMATERA UTARA PADA AKHIR ABAD XIX 5

A. Pemerintahan 5
B. Sosial Budaya 8
C. Kehidupan Ekonomi 12
D. Perkembangan Alam Pikiran dan Kepercayaan 14

BAB III KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1920 – 1928 19

A. Pengaruh Politik Etika Di Daerah 19
B. Kegiatan Masyarakat Yang Bergayutan (Relevan) Dengan Kebangkitan Nasional di Daerah Sumatra Utara 20
C. Interaksi Daerah Dengan Berdirinya Partai/ Organisasi 23

1. Budi Utomo 26
2. Syarikat islam 27
3. Indische Partij 28
4. Muhammadiyah 28
5. Taman Siswa 30
6. Organisasi Kepemudaan 31
7. Organisasi Gereja 32
8. Organisasi-organisasi Islam 33
9. Organisasi Wanita 34

D. Keadaan Di Daerah Sekitar Perang Dunia I (1914 - 1918) Dan Pendirian Volksraad 34

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda Sekitar Perang Dunia I 34

2. Keadaan Masyarakat 36
3. Hubungan Dengan Volksraad 40

E. PERJUANGAN DI DAERAH 43

1. Interaksi Dengan Pemogokan-pemogokan Di Daerah Di Sekitar Tahun 1932 ... 43
2. Interaksi Dengan Pemberontakan Tahun 1926 - 1927 46
3. Sikap Masyarakat Terhadap Asas Non Koperasi Dan Kooperasi Terhadap Pemerintah Hindia Belanda 48
4. Interaksi Dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) 50
5. Interaksi Dengan Sumpah Pemuda 52
6. Kegiatan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kehidupan 53

BAB IV KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 - 1942 57

A. Pengaruh Politik Pemerintah Hindia Belanda Pada Tahun ± 1930 57

1. Politik Keras Terhadap Gerakan Non Kooperasi 57
2. Undang-undang Sekolah Swasta 58

B. Depresi Ekonomi Di Daerah Sumatra Utara 60
C. Interaksi Terhadap Kepartaian/Organisasi ... 61
D. Keadaan Di Daerah Menjelang Keruntuhan Pemerintah Hindia Belanda 64
1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda 64
2. Keadaan Masyarakat 65
3. Sikap Masyarakat Terhadap Pemerintah Hindia Belanda 65
4. Keadaan Pemerintah Hindia Belanda Pada Saat Terakhir Di Sumatra Utara 66

E. Kedatangan Pasukan Pendudukan Jepang ... 67
1. Propaganda Jepang Yang Terasa Di Daerah Sumatra Utara 67

2. Waktu Kedatangan Pasukan Jepang 68
3. Sikap Jepang Terhadap Aparatur Pemerintah Hindia Belanda 70
4. Sikap Jepang Terhadap Bangsa Indonesia 71
5. Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Jepang 72

DAFTAR BACAAN 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah tahun 1976/1977 telah berhasil menyusun Sejarah Daerah Sumatra Utara secara keseluruhan. Penulisan Sejarah Daerah Sumatra Utara itu barulah merupakan pokok-pokok dan garis besar Sejarah Daerah Sumatra Utara.

Penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah penggarapan lebih lanjut, yaitu berupa penulisan tematis dengan Judul *Sejarah Kebangkitan Nasional Di Daerah Sumatra Utara (± 1900 - 1942)*. Pada penelitian lanjutan ini diharapkan dapat diperoleh bahan-bahan yang lebih luas dan mendalam sehingga masalah Sejarah Kebangkitan Nasional di Sumatra Utara dapat didekati dan dipecahkan serta mencapai penguraian yang lebih sempurna.

Secara khusus penelitian dan penyusunan Sejarah Kebangkitan Nasional di Sumatra Utara bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia. Dengan demikian, maka tujuan penyusunan Sejarah Kebangkitan Nasional di daerah Sumatra Utara ini tidak terpisah dari usaha menyusun Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia. Jadi tujuan penelitian dan penyusunan ini ialah untuk mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan Sejarah Daerah Sumatra Utara tentang zaman Kebangkitan Nasional di daerah Sumatra Utara melengkapi Sejarah Nasional dan untuk memantapkan konsep-konsep yang relevan antara perkembangan Sejarah Daerah dengan Sejarah Nasional.

B. MASALAH

Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia di Daerah Sumatra Utara belum diungkapkan dan disusun secara sistematis. Dewasa ini terasa sekali kekurangan bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan Kebudayaan. Di samping itu penelitian ini berguna untuk masyarakat, terutama di bidang pendidikan.

Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia yang telah disusun sampai dewasa ini belum ada yang mengungkapkan perjuangan Kebangkitan Nasional yang terjadi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tiap-tiap daerah sebenarnya mengalami berbagai macam corak dan ragam perjuangan sesuai dengan perkembangan daerah-daerah itu sendiri. Jika Sejarah perjuangan Kebangkitan Nasional di daerah-daerah itu diungkapkan dan disusun secara sistematis, maka gambaran Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia itu menjadi semakin kaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penelitian dan penyusunan tentang Kebangkitan Nasional di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sumatra Utara sebagai salah satu daerah di Indonesia memperlihatkan gerak perjuangan Kebangkitan Nasional sejak tahun 1900 sebagaimana juga di daerah-daerah lain. Gerak perjuangan tersebut mempunyai segi-segi khusus sesuai dengan keadaan daerah Sumatra Utara itu sendiri. Apabila segi-segi yang khusus itu diselidiki akan diperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang peristiwa-peristiwa di Tanah Air Kita pada zaman itu.

Akhirnya akan diperoleh gambaran Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia secara keseluruhan yang lebih kaya, lebih bervariasi dan lebih sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

C. RUANG LINGKUP

Sejarah Kebangkitan Nasional di Sumatra Utara sebenarnya sangat luas. Oleh karena itu dalam penulisan ini perlu diberikan batasan sebagai berikut:

1. Peristiwa-peristiwa yang akan diungkapkan ialah meliputi segi-segi kehidupan yang berkaitan dengan Kebangkitan Nasional, yaitu segi kehidupan, pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan, perekonomian, seni-budaya, alam pikiran, agama dan kepercayaan.
2. Batasan waktu yang akan diungkapkan meliputi kurun waktu antara kira-kira tahun 1900 sampai tahun 1942 yang dibagi atas beberapa babakan waktu yaitu:
   a. Keadaan di Daerah Sumatra Utara pada akhir Abad XIX.

b. Keadaan di daerah Sumatra Utara dari tahun 1900 sampai tahun 1928.

c. Keadaan di daerah Sumatra Utara dari tahun 1928 sampai tahun 1942.

3. Daerah penelitian ialah seluruh Propinsi Sumatra Utara sekarang ini. Daerah ini meliputi Sumatra Timur, Tapanuli, termasuk Nias. Berbeda dengan beberapa daerah lain di Indonesia, ternyata daerah Sumatra Utara ini mempunyai keragaman dalam perkembangan sejarahnya sesuai dengan keragaman suku-suku bangsa dan lapisan masyarakat di daerah ini.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH/PROSEDUR PENELITIAN.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan Tim Penyusunan berpegang teguh kepada metodologi sejarah. Langkah pertama yang dilakukan ialah untuk memperoleh sumber-sumber itu diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Bahan penelitian kepustakaan itu berupa buku, brosur, surat kabar, majalah sedangkan penelitian lapangan dititik beratkan kepada wawancara dengan tokoh-tokoh pergerakan di daerah ini. Mereka merupakan sumber primer karena secara langsung mengalami peristiwa-peristiwa mengenai kebangkitan Nasional di daerah ini.

Di samping itu keterangan telah dikumpulkan pula dari orang-orang yang karena profesinya banyak mengetahui peristiwa sejarah di daerah ini. Mereka itu ialah guru, ulama, wartawan, seniman dan cendekiawan.

Di dalam pengolahan bahan-bahan yang telah dikumpulkan itu telah diusahakan melakukan seleksi sebaik-baiknya. Tujuan seleksi ini untuk memilih kejadian-kejadian yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian.

Untuk mencapai objektifitas penulisan, maka Tim penyusun berusaha melakukan kritik, yaitu menilai sumber-sumber dan isi keterangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

E. HASIL AKHIR

Naskah ini akhirnya merupakan hasil kerja sama antara

berbagai pihak. Naskahnya yang asli dikerjakan oleh suatu Tim Penyusunan di Sumatra Utara yang penggarapannya mengikuti pola dan kerangka seperti ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penyempurnaan dan penilaian bersama, baik oleh Tim dari Pusat (P3KD) maupun oleh Tim Penyusun di daerah Sumatra Utara. Hasil penyempurnaan dan penilaian itulah yang dijadikan pedoman untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Sedangkan mengenai pekerjaan editing itu sendiri kegiatannya diarahkan kepada beberapa segi, yaitu: materi atau bahan, kebahasan dan pendekatan. Segi materi didasarkan pada hasil penilaian, sedangkan kebahasan diperhatikan beberapa hal, seperti. ejaan, istilah dan keterbacaan.

Dalam menulis naskah sejarah daerah, kiranya pendekatan regiosentris merupakan cara yang wajar, dan dari naskah ini dapatlah dikemukakan, bahwa para penyusun telah berusaha mendekati permasalahannya dengan cara demikian.

Selanjutnya naskah ini hendaknya dipandang sebagai pembuka jalan atau perintisan ke arah penelitian dan penyusunan sejarah daerah yang lebih baik dengan berbagai kemungkinan yang lebih kaya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran. Perlu juga dikemukakan, bahwa meskipun di dalam naskah ini hal-hal mengenai sejarah nasional masih kelihatan agak jelas, namun hendaknya dilihat, sebagaimana dikemukakan oleh Tim Penyusunnya sendiri, dalam hubungannya dengan latar belakang peristiwa ataupun konteks permasalahan kesejarahannya. Sebaliknya bahan-bahan mengenai sejarah daerah itu sendiri akan merupakan bahan yang berguna untuk menyusun sejarah nasional pada Tim Kebangkitan Nasional. Hasil akhir ini secara keseluruhan dapat dipandang sebagai sesuai dengan *Terms of Reference* sebagaimana dijabarkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH SUMATRA UTARA PADA AKHIR ABAD XIX

A. PEMERINTAHAN

Pada abad XIX terjadi perubahan penting dalam susunan pemerintahan di Sumatra Utara sebagai akibat masuknya kekuasaan Belanda. Dengan masuknya kekuasaan Belanda itu, maka susunan pemerintahan tradional ditempatkan di bawah susunan pemerintahan kolonial.

Kerajaan-kerajaan di pesisir Timur Sumatra Utara seperti Leidong, Bilah, Batu Bara, Kota Pinang, Kualuh, Serdang, Deli, dan Langkat menandatangani *Acte van Erkenning en Bevestiging* yang mengakui kedaulatan Belanda pada tahun 1862. Kekuasaan di pesisir Barat telah mulai tertanam di Singkil dan Barus pada tahun 1839 dan 1840. Ke daerah Mandailing masuknya kekuasaan Belanda setelah seorang penguasa di Mandailing menandatangani perjanjian Tembaga di masa Perang Paderi. Kekuasaan Belanda di daerah ini baru tertanam setelah tahun 1842. Di Nias kekuasaan Belanda baru masuk setelah berakhir perlawanan-perlawanan rakyat, di beberapa daerah seperti Lagundri 1855, Hiligeho 1908, Lahomi 1909, Moro'o 1910, akhirnya di Magai Haruna 1915. Di Tapanuli Utara kekuasaan Belanda masuk setelah berakhirnya perlawanan Raja Sisingamangaraja yang memimpin perlawanan rakyat di daerah ini pada tahun 1907.

Setelah tertanamnya kekuasaan Belanda di Sumatra Timur maka terdapat dua bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan Gubernemen dan pemerintahan *Landschap*. *Landschap* itu ialah pemerintahan raja-raja yang didampingi oleh organ pemerintah Gubernemen, dengan pangkat paling tinggi Asisten Residen. Beberapa kerajaan besar di Sumatra Timur seperti Langkat, Deli, Asahan, dan Serdang. Pemerintahannya didampingi oleh seorang Asisten Residen. Beberapa kerajaan lain yang kecil-kecil seperti Leidong, Kualuh, Kota Pinang, dan lain-lain menjadi bagian dari pemerintahan Gubernemen dalam lingkungan satu *afdeeling*. Begitu juga kerajaan-kerajaan di Simalungun seperti Silou, Purba,

Panei, Raya, Siantar, Silimakuta, Tanah Jawa, bersama-sama dengan beberapa kerajaan-kerajaan kecil di Tanah Karo seperti Lingga, Kutabuluh, Sarinembah, Barusjahe, dan Suka. Semuanya di bawah satu *afdeeling* yang disebut *Afdeeling Simaloengoen en Karolanden.* Setelah berdiri Keresidenan Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga dan perluasan Belanda di Mandailing dan Tapanuli Utara, maka disusunlah kekuasaan administrasi pemerintahan sebagai berikut: *Afdeeling Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok* di Padang Sidempuan, *Batak Landen* berkedudukan di Tarutung dan Nias berkedudukan di Gunung Sitoli.

Setelah tersusun pemerintahan Kolonial di Sumatra Utara, maka gambaran susunan pemerintahan di Sumatra Utara adalah sebagai berikut:

Daerah ini terdiri dari dua keresidenan, yaitu Keresidenan Sumatra Timur dan Keresidenan Tapanuli. Stratifikasi kekuasaan pemerintahan di Tapanuli berbeda dengan di Sumatra Timur, karena di Sumatra Timur terdapat beberapa kerajaan (kesultanan), sedang di Tapanuli dan Nias hal yang seperti ini tidak ada.

Di Tapanuli Keresidenan dibagi atas empat afdeeling yaitu *Afdeeling Batak Landen* dengan ibukota Tarutung, *Afdeeling Sibolga en Onstragen* dengan ibukota Sibolga, *Afdeeling Angkola en Sipirok* dengan ibukota Padang Sidempuan, *Afdeeling Nias* dengan ibukota Gunung Sitoli. Tiap afdeeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Kemudian tiap *afdeeling* itu dibagi lagi atas beberapa *onder afdeeling* atau distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang *Controleur.* Kepala pemerintahan pribumi yang setingkat dengan Kontrolir itu ialah Demang. Selanjutnya tiap Distrik dibagi atas beberapa Onderdistrik yang dikepalai oleh kepala pemerintahan pribumi dengan pangkat Asisten Demang. Kedudukan pemerintahan di bawah Asisten Demang berbeda pula antara Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Nias. Di Tapanuli Utara di bawah Asisten Demang disebut Kepala Negeri yang mengepalai Kenegerian, di Tapanuli Selatan disebut Kepala Kuria yang mengepalai Kuria sedang di Nias disebut Tehounori yang mengepalai Ori.

Sebagai contoh kita ambil satu Negeri di Tapanuli Utara yaitu Negeri Parmaksian. Negeri itu dikepalai oleh seorang Kepala Negeri. Negeri ini berada di bawah lingkungan Onder Distrik Porsea yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan di Porsea, Onder Distrik Porsea berada di bawah kekuasaan

Onder Afdeeling Toba yang dikepalai oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Balige. Di samping *Controleur* itu terdapat pula jabatan yang dipegang oleh seorang pribumi yang disebut Demang. Selanjutnya *Onder Afdeeling* Toba adalah bagian dari Afdeeling Batak Landen yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Tarutung. Akhirnya *Afdeeling Batak Landen* termasuk ke dalam Keresidenan Tapanuli yang diperintahi oleh seorang Residen yang berkedudukan di Sibolga.

Di Sumatra Timur Residen yang berkedudukan di Medan mengepalai empat *Afdeeling,* yaitu Langkat, Deli, dan Serdang, Asahan, Simalungun, dan Karolanden. Kedudukan kekuasaan di Langkat, Deli, Serdang, Asahan sesudah Assisten Residen langsung dikuasai oleh Sultan sebagai Kepala *Landschap.* Namun di bawah kekuasaan Asisten Residen itu masih terdapat *Kontrolir* yang mengepalai beberapa daerah yang masing-masing dikepalai oleh Datuk-Datuk. Misalnya Sultan Deli didampingi oleh seorang Asisten Residen. Di dalak Kesultanan Deli itu terdapat empat daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang Datuk, yaitu Serbanyaman, berkedudukan di Sunggal; Sepuluh Dua Kuta berkedudukan di Hamparan Perak; Sukapiring berkedudukan di Deli Tua; Senembah berkedudukan di Petumbak. Keempat Datuk ini hanya didampingi oleh dua orang *Controleur* yang mengepalai *Onder Afdeeling Beneden Deli* yang berkedudukan di Medan, sedangkan *Onder Afdeeling Boven Deli* kedudukan *Controleur* ada di Arnhemia (Pancurbatu).

Di daerah Simalungun dan Tanah Karo berkedudukan seorang Asisten Residen di Pematang Siantar. Kerajaan-kerajaan di Simalungun dikoordinasi oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Pematang Siantar. Seterusnya Sibayak-Sibayak di Tanah Karo dikoordinasi oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Kabanjahe kemudiannya. Demikianlah gambaran susunan Pemerintahan di Sumatra Utara pada masa pemerintahan Kolonial yang secara umum kita lihat dua macam kekuasaan, yaitu kekuasaan Gubernemen dan kekuasaan Pribumi. Kekuasaan Pribumi yang tertinggi ialah Raja, Sultan, dan Demang, sedang kekuasaan Gubernemen yang terendah adalah *Controleur.* Titik pertemuan antara dua kekuasaan itu ialah pada Asisten Residen, *Controleur* pada pihak Gubernemen dan Raja, Sultan, Sebayak, Tehonuri, Demang atau Datuk pada kekuasaan Pribumi. Demang demikian kekuasaan Pribumi itu telah diatur secara sistematis dan ditempat-

kan di bawah kekuasaan Gubernemen.

B. SOSIAL BUDAYA

Sampai abad XIX di Sumatra Utara pendidikan berlangsung secara tradisional. Pendidikan tradisional itu bersifat informal, maksudnya berlangsung terus menerus dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Dalam hal ini peranan keluarga sangat penting, begitu pula peranan masyarakat lingkungan dalam pendidikan. Pengetahuan yang diperlukan bagi kehidupan seperti bercocok tanam, adat istiadat, kepercayaan diwariskan kepada generasi muda melalui pergaulan sehari-hari dan dalam kehidupan rumah tangga.

Isi pendidikan yang diberikan pada anak-anak berintikan usaha untuk mewarisi nilai-nilai tradisional, yaitu segi-segi kepercayaan, tata hubungan sosial yang secara mutlak dianggap sebagai pegangan hidup anak-anak mereka di masa depan.

Adapun pengetahuan teknis seperti bertani, berburu dan sebagainya, tidak lepas dari isi kepercayaan dan tata hubungan sosial tradisional. Dalam hidup tradisional, maka nilai kepercayaan dan adat istiadat meliputi seluruh segi kehidupan yang lain. Begitulah di daerah pesisir, anak-anak diwarisi cara-cara menangkap ikan di laut, tetapi di samping itu yang penting ialah bagaimana mewariskan nilai-nilai kepercayaan yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Bagaimana kedudukan seorang pawang untuk menetapkan hari yang baik untuk turun ke laut, mengatur tata cara yang berkaitan dengan penangkapan ikan keharusan dan pantangan adalah penting sekali.

Di daerah pedalaman seperti di Tapanuli, Simalungun, Karo dan lain-lain, peranan *datu* sangat penting dalam hidup pertanian. Mereka mengatur dan mengajarkan cara-cara magis untuk memperoleh hasil yang baik, menentukan kewajiban-kewajiban dan pantangan-pantangan agar hasil panen itu memuaskan.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, maka segi tata hubungan sosial, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain memainkan peranan penting. Hal itupun diatur secara tradisional dalam adat-istiadat. Adat istiadat itu pun berintikan kepercayaan, malahan dapat dikatakan, bahwa isi kepercayaan itu dinyatakan dalam melaksanakan adat istiadat itu. Misalnya dalam masyarakat Batak maka kedudukan seorang *hula-hula* sangat tinggi. Pihak hula-hula, yaitu pihak keluarga isteri kita dapat memberikan keberuntungan jika kita memenuhi tugas-tugas kewajiban adat secara baik, sebaliknya dapat memberikan mala petaka, jika kita melalaikan tugas-tugas kewajiban kita kepada mereka.

Demikianlah aturan tutur serta tata hubungan dalam masyarakat telah diajarkan secara teliti kepada anak-anak sejak anak-anak itu kecil. Hal itu bukan di kalangan orang Batak saja tetapi juga di daerah Melayu. Hanya hubungan kekeluargaan yang dikenal di kalangan orang Batak (baik Toba, Simalungun, Karo ataupun Mandailing) jauh lebih luas daripada di kalangan orang Melayu, Tata hubungan sosial di kalangan orang Batak itu dikenal dengan *"Dalihan Na Tolu,"* yaitu *Mora, Kahanggi, Anak Boru* di Tapanuli Selatan, *Hula-Hula, Boru* dan *Dongan Tubu* di Toba, *Kalimbubu, Anak Beru* dan *Senina* di Karo.

Dengan terpenuhinya segi-segi pendidikan yang meliputi kepercayaan dan adat istiadat ini, maka sempurnalah kehidupan seseorang dan mereka dianggap dewasa, artinya telah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh sebab itulah maka kedewasaan pada masyarakat tradisional diukur bukan dari segi jumlah pengetahuan, tetapi setelah seseorang berumah tangga karena sesudah berumah tangga itulah seseorang dapat melaksanakan tugas hidupnya dengan sempurna. Kesempurnaan kedewasaan itu pun bertingkat-tingkat pula tergantung kepada keturunan mereka. Jika seseorang telah berumah tangga, telah berturunan dan telah bercucu, maka sempurnalah hidup dalam tata hubungan sosial dan berarti sempurnalah pula pelaksanaan segi-segi adat dan kepercayaan.

Pendidikan non formal yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat terdapat di kalangan orang-orang Islam di bawah pimpinan ulama-ulama. Mereka pada mulanya mengambil oper kedudukan *datu* dan *pawang* pada daerah sekitarnya. Kepandaian mereka dalam ilmu batin, keampuhan do'a mereka menyembuhkan penyakit, dan lain-lain menyebabkan mereka populer di kalangan masyarakat. Pada masyarakat yang memeluk agama Islam itu lama kelamaan terdapat lembaga pendidikan yang berpusat pada pengajian-pengajian. Begitu pula surau dan mesjid di samping tempat ibadah dipergunakan juga untuk melakukan pendidikan.

Ilmu-ilmu pengetahuan dikembangkan juga di dalam pengajian itu, seperti pelajaran bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama. Tugas pendidikan agama itu yang utama ialah untuk mengajar orang hidup saleh. Namun di samping itu pada berbagai tempat seperti di Langkat, Asahan, Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan terdapat pula beberapa ulama yang berkedudukan sebagai pemimpin tharikat. Kemudian pada beberapa tempat dijumpai pula pengajar-

an tentang ilmu-ilmu agama seperti fiqih, nahu, syaraf, tauhid dan sebagainya yang dipelajari oleh murid-murid yang ingin mempelajari agama secara lebih mendalam.

Setelah missi-missi agama Kristen masuk ke Tapanuli pada akhir Abad XIX, maka berdirilah jemaah-jemaah Kristen di kalangan penduduk di bawah pimpinan para pendeta. Mereka melaksanakan pendidikan agama, yang bertujuan menanamkan keimanan di kalangan penduduk yang selama ini menganut kepercayaan *pelbegu*. Lama kelamaan pendidikan di kalangan missi ini diperluas dan diperdalam untuk memperoleh tenaga-tenaga pelayan gereja. Mereka mempelajari Al Kitab dalam bahasa daerah dan memakai aksara Batak dan aksara Latin. Pengajaran diperluas pula untuk memperoleh tenaga-tenaga teknis seperti tenaga perawat, tenaga petani terdidik. Hal itu tidak saja berpengaruh pada peri kehidupan gereja, tetapi memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan peri kehidupan penduduk seluruhnya.

Pada mulanya penyiar-penyiar agama Kristen di Tapanuli sangat keras terhadap segi-segi kepercayaan tradisional serta adat istiadat, mereka khawatir pemakaian tata cara tradisional itu tidak dapat membersihkan iman para jemaah mereka. Oleh sebab itulah pemakaian musik di dalam upacara-upacara dilarang. Tetapi kemudian sejak tahun 1868 pemakaian gondang itu ditinjau kembali dan boleh dipakai dalam upacara pesta dengan syarat haruslah dengan lagu-lagu gembira dan tidak boleh memakai lagu-lagu yang membuat kesurupan.

Apabila kita perhatikan uraian di atas, jelaslah, bahwa pada abad XIX ada tiga golongan yang sangat besar peranannya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Sumatera Utara, yaitu golongan *datu, ulama* dan *pendeta*. Ketiga golongan inilah yang menjadi sumber pengetahuan menjelang akhir abad XIX di daerah ini untuk keperluan masyarakat sekitarnya.

Sementara itu raja-raja pribumi yang telah berada di bawah kekuasaan Belanda sedikit demi sedikit memperoleh pengaruh dari orang Belanda. Tata cara administrasi pemerintahan tradisional telah diubah menurut pola baru yang dibawa Belanda. Hal itu menuntut pengetahuan baru seperti menulis, membaca, bahasa Belanda yang semuanya ini tidak dapat dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang secara tradisional tersedia di tengah masyarakat. Mereka memperoleh pengetahuan seperti ini melalui

kontak pribadi dengan orang Belanda yang selalu berhubungan dengan mereka.

Raja-raja pribumi yang telah berada di bawah kekuasaan Belanda sedikit demi sedikit memperoleh pengaruh dari orang Belanda. Hubungan dengan orang Belanda mulai membuka mata mereka untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dengan cara menyesuaikan diri dengan pola kehidupan Barat. Anak-anak mereka mulai diarahkan untuk memperoleh kedudukan sebagai ambtenar dengan memperoleh pendidikan Barat. Golongan yang telah memperoleh pendidikan Barat itu semakin banyak setelah pada beberapa tempat mulai dirintis untuk membuka sekolah-sekolah. Sebenarnya sekolah-sekolah baru dibuka pada abad XX, tetapi pada akhir abad XIX telah ada beberapa orang Indonesia yang pada mulanya bekerja sebagai juru tulis di kantor-kantor kemudian berhasil memperoleh kesempatan untuk belajar yang lebih tinggi.

Hal seperti ini berlangsung pada hampir semua tempat. Begitu yang berlaku di Sumatera Timur, begitu pula di Tapanuli. Jelasnya pada tingkat yang tertua kontak pendidikan Barat itu di Sumatra Utara selain melalui pendidikan gereja adalah melalui latihan sebagai dagang pada kantor kepala negeri, kantor dagang atau kantor lain. Lama kelamaan mereka ini dilatih menulis, membaca dan sedikit bahasa Belanda sekedar yang diperlukan untuk komunikasi. Dari saluran seperti inilah lahirnya beberapa orang yang beruntung berhasil memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Anak-anak raja di Sumatra Timur yang dipersiapkan untuk memangku jabatan kelak dalam pemerintahan, begitu pula anak-anak orang terkemuka yang baik hubungannya dengan Belanda mendapat pelayanan latihan yang lebih baik pula. Mereka telah memperoleh pendidikan Barat melalui pendidikan khusus yang sifatnya sangat pribadi dan di antaranya ada pula yang belajar ke tempat lain. Umumnya mereka inilah sumber tenaga terlatih yang dipergunakan pemerintahan kolonial untuk memutar roda kekuasaannya di daerah ini. Begitu pula di antaranya sebagai tenaga untuk perusahaan-perusahaan partikelir di daerah ini. Umumnya mereka ini merasa tersisih dari lingkungan bangsanya sendiri. Namun tidak semuanya seperti itu. Ada juga di antara mereka itu setelah memperoleh pendidikan Barat, merasa terpanggil untuk membuka kesempatan yang lebih luas untuk memajukan bangsanya. Di antara sekian banyak orang seperti itu, maka Willem

Iskandar yang paling menonjol. Willem berasal dari Pidoli (Tapanuli Selatan). Beliau mendapat kesempatan belajar di negeri Belanda selama 4 tahun yaitu 1857 – 1861. Hasil pendidikan yang dicapainya tidak memisahkan dia dari bangsanya, malahan membuka matanya akan ketinggalan bangsanya itu di banding dengan bangsa Barat. Beliau bercita-cita untuk mendidik masyarakat kampung halamannya. Selain menjadi guru beliau banyak menulis buku-buku dalam bahasa Mandailing. Buku yang terkenal ialah *Sirumbuk-rumbuk Sibulus-bulus.* Buku ini dipergunakan untuk bacaan di sekolah-sekolah setelah di daerah ini dibuka sekolah-sekolah itu. Isi buku ini banyak mengandung sindiran tentang keserakahan orang Belanda di tanah jajahan.

C. KEHIDUPAN EKONOMI

Pada abad XIX kehidupan ekonomi di Sumatra Utara mempunyai berbagai corak ragam sesuai dengan geografi serta perkembagan di daerah masing-masing. Secara keseluruhan daerah ini pada waktu itu dapat kita bagi atas tiga pola kehidupan ekonomi, yaitu desa pedalaman dengan titik berat usaha pertanian dan hasil hutan, desa pantai dengan titik berat usaha nelayan dan daerah perkebunan dengan titik berat usaha buruh.

Daerah Tanah Karo, Simalungun, Tapanuli adalah daerah petanian dan kesatuan-kesatuan ekonomi meliputi desa atau kesatuan-kesatuan beberapa desa. Pada tiap-tiap kesatuan ini masyarakat hidup hampir-hampir tidak memerlukan barang yang berasal dari luar, kecuali beberapa barang penting seperti garam. Dengan demikian pemakaian uang sebagai alat penukar tidak penting, sebab umumnya benda dan tenaga tidak selalu dinilai dengan uang.

Di daerah tepi pantai Barat dan pantai Timur Sumatra Utara terdapat desa-desa pantai yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan. Mereka memperoleh bahan makanan pokok dari petani yang tinggal berdampingan dengan mereka. Dengan demikian kesatuan-kesatuan ekonomi di daerah desa pesisir itupun adalah meliputi satu desa atau kesatuan yang terdiri dari beberapa desa. Pemakaian uang sebagai alat tukar hampir sama dengan di desa-desa pedalaman, yaitu tidak penting.

Gambaran di atas adalah gambaran umum dan harus diingat bahwa jalur-jalur hubungan antara daerah pesisir dengan daerah

pedalaman sejak zaman purba telah ada. Jalur-jalur itu melalui sungai atau melalui jalan darat dengan berjalan kaki. Ada juga pemakaian kuda beban antara satu tempat dengan tempat yang lain. Namun harus diingat pula bahwa jalur lalu lintas itu sangat langka dan hampir-hampir tidak membawa pengaruh bagi kehidupan secara luas.

Daerah yang ketiga yaitu daerah-daerah yang sejak pertengahan kedua abad XIX dibuka menjadi daerah perkebunan. Daerah ini terutama di Sumatra Timur. Tanah-tanah untuk perkebunan itu diperoleh pengusaha perkebunan dari raja-raja atau Sultan-sultan melalui konsesi. Hal itu berarti, bahwa tanah-tanah di daerah ini dikeluarkan untuk keperluan perkebunan, baik tanah yang diusahakan penduduk ataupun tanah yang masih kosong. Hal itu dapat berlaku pada prinsipnya tanah-tanah di daerah ini dianggap sebagai milik atau dikuasai oleh raja-raja. Lain halnya dengan tanah-tanah di Tapanuli yang secara tradisional sebagai milik *marga* atau desa sebagai *hak ulayat*.

Dengan demikian di Sumatra Timur di samping desa-desa pertanian, desa pantai terdapat daerah-daerah perkebunan yang diusahakan oleh maskapai-maskapai seperti *Deli Maatschappij* dan lain-lain. Dengan dibukanya perkebunan-perkebunan itu maka desa-desa petani masih dijumpai, tetapi sekarang telah semakin sempit ruang hidupnya dan mereka terpaksa menyingkir ke daerah yang lebih jauh dari kampung halaman semula. Sebagian mereka yang kehilangan tanah-tanah pertanian itu bertahan terus di desa-desa asal dan kemudian mereka diperkenankan memakai tanah perkebunan selama tanaman tembakau untuk beberapa tahun tidak ditanam dalam rangka rotasi. Tanah-tanah seperti inilah yang disebut *tanah jaluran* dan penduduk seperti inilah yang disebut *rakyat penunggu*.

Kehidupan masyarakat perkebunan di Sumatra Timur dikenal sebagai kehidupan Kuli kontrak. Sebutan itu memberi gambaran yang umum dikenal di daerah ini, yaitu dengan ciri kehidupan yang terpisah dari penduduk asli baik ekonomis, sosiologis dan budaya. Mereka diperlakukan sebagai kuli dengan mendapat kebutuhan yang sanat kecil dengan imbalan pekerjaan yang sangat berat. Tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk melepaskan status sebagai kuli kontrak itu, karena mereka terikat dengan perjanjian-perjanjian.

Perkebunan di daerah ini mulai tumbuh sejak tahun 1865.

Pada waktu itu Jacobus Nienhuis melakukan percobaan penanaman tembakau di Deli. Kemudian setelah berhasil diusahakanlah memperoleh hak konsessi untuk pemakaian tanah selama 99 tahun. Pada tahun 1869 telah berdiri perusahaan *Deli Maatshappij* yang mengusahakan penanaman tembakau di Sumatra Timur. Selanjutnya perusahaan-perusahaan perkebunan itu berkembang dengan cepat sekali, seperti *Deli-Batavia Maatschappij yang mempunyai 9 onderneming; Holland-Sumatera Tabak Maatschappij* yang mempunyai 13 *onderneming,* dan beberapa maskapai lain.

D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN

Dalam membicarakan alam pikiran dan kepercayaan penduduk di Sumatra Utara pada abad XIX kita tidak boleh dilupakan perkembangan agama di daerah ini. Oleh karena perkembangan agama itulah yang banyak mengubah cara berpikir masyarakat. Kemudian perubahan cara berpikir Barat yang sejak abad XIX menyusup ke tengah masyarakat Sumatra Utara.

Sebelum tahun 1800 sebagian besar penduduk di pesisir Timur telah menganut agama Islam. Di daerah pedalaman seperti di Tanah Karo, Dairi, Toba, Simalungun, Silindung masyarakat menganut kepercayaan asli yang bersifat animisme dan dinamisme. Kepercayaan seperti itu disebut *Pelbegu.* Peribadatan yang utama pada masyarakat *Pelbegu* itu ialah memberikan persembahan kepada roh nenek moyang yang di Tapanuli disebut *Simangot ni Ompu.* Penyembahan roh leluhur yang diujudkan dengan patung pada masyarakat Nias disebut *Malohe Adu.*

Daerah Tapanuli Selatan telah berkembang agama Islam sejak permulaan abad XIX, yaitu disebarkan oleh kaum Paderi.

Kejadian penting dalam penyiaran agama di Sumatra Utara pada abad XIX ialah masuknya agama Kristen yang disiarkan oleh beberapa Missionaris ke daerah pedalaman, yaitu Silindung, Toba, Simalungun dan Tanah Karo. Lain daripada itu kedatangan orang Cina ke Sumatra Utara pada abad XIX membawa kepercayaan mereka sendiri walaupun orang-orang Cina itu menyebar pada beberapa tempat dan kepercayaan mereka dikenal pula oleh penduduk, namun pengaruh agama mereka kepada masyarakat di daerah ini tidak ada. Begitu juga orang Keling dan Sikih yang membawa agamanya masing-masing tidak mempengaruhi kehidupan beragama rakyat di daerah ini.

Agama Islam dan agama Kristen yang banyak pengaruhnya kepada penduduk. Daerah-daerah pedalaman yang dahulunya menganut kepercayaan pelbegu banyak berubah kepercayaannya menjadi penganut agama Islam dan Kristen.

Penyiaran agama Kristen ke Sumatra Utara di pelopori oleh Ward dan Burton pada tahun 1820 di daerah sekitar Sibolga. Setelah mengalami berbagai kegagalan di pesisir, mereka masuk ke pedalaman sejak tahun 1824, yaitu ke daerah Silindung. Sejak tahun 1834 dua orang penginjil dari Amerika yaitu Munson dan Lyman dalam usaha menyiarkan agama Kristen ke daerah ini mengalami nasib malang dan gugur sebagai *martyr* di Lobu Pining. Penyiaran agama Kristen ke Tapanuli lebih pesat majunya setelah 7 Oktober 1861 dengan berdirinya HKBP di Sipirok. Kemajuan yang sangat penting ialah setelah Dr. Nommensen yang bagi orang Batak dianggap sebagai nenek atau *Ompu* datang ke Tapanuli pada tahun 1865. Beliau kemudian mengambil daerah penyiaran di Sigumpar di daerah Toba. Kemajuan itu dapat kita lihat dalam semacam konperensi yang diadakan pada tahun 1881 di Pearaja, Tarutung. Walaupun tempat tinggal Nommensen sampai akhir hayatnya di Sigumpar, tetapi yang merupakan pusat HKBP itu ialah Pearaja dan pusat pendidikannya ialah di Sipoholon. Sepuluh tahun kemudian juga masuk ke daerah Samosir.

Daerah Simalungun menerima agama Kristen setelah para penginjuil dari Tapanuli meluaskan usaha mereka untuk menyiarkan agama Kristen ke daerah tersebut. Demikian juga ke Nias.

Daerah Karo menerima agama Kristen yang dipelopori oleh Dr. Kruyut di Buluh Kawar. Penyiaran itu berlangsung sejak tahun 1890 dan kemudian berpusat di Kabanjahe.

Sementara itu pada abad XIX di daerah pesisir Timur Sumatra Utara, yaitu di kerajaan-kerajaan Langkat, Deli, Serdang, Asahan dan lain-lain agama Islam dimajukan penyiarannya oleh Sultan-sultan yang memberi bantuannya kepada para ulama dan membangun masjid-masjid dan pusat-pusat tarikat yang dipimpin oleh para Syekh atau mursyid, seperti Tharikat Nakhsyabandiyah dipimpin oleh Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam, Langkat.

Dengan penyiaran agama di daerah Sumatra Utara itu tidaklah berarti, bahwa alam pikiran lama telah hapus sama sekali. Di kalangan orang Islam, begitu pun di kalangan orang Kristen, alam pikiran tradisional yang berporoskan kepada kepercayaan

nenek moyang masih sangat kuat. *Datu-datu* masih berperanan di tengah masyarakat. Apalagi memang masih ada orang yang menganut *pelbagu*. Begitu pula di kalangan orang Islam kepercayaan terhadap roh dengan bantuan dukun masih sangat kuat.

Kedudukan ulama-ulama pada abad XIX merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Masyarakat Islam menganggap bahwa para ulama dapat memberikan bermacam-macam mukjizat, yang memberi keuntungan bagi kehidupan pengikut-pengikutnya. Jika pada kepercayaan asli datu yang dapat menghubungkan masyarakat dengan roh nenek moyang, begitu pula di kalangan orang Islam pada zaman itu diangap bahwa ulama itu dapat menghubungkan mereka dengan Allah. Malahan setelah beberapa ulama besar berpulang ke rahmatullah, kuburan mereka tidak lupa dikunjungi oleh penduduk untuk mendapat berkah.

Maka tujuan beragama pada masa itu adalah tujuan yang sama dengan penganut *pelbegu*, yaitu untuk memperoleh keberuntungan atau kesejahteraan duniawi baik berupa kekayaan, maupun kesuburan keluarga dengan bantuan para guru atau roh, arwah para guru itu.

Pada akhir abad XIX telah makin banyak orang berpendidikan Islam yang kembali dari Mekkah atau Mesir, kemudian memberikan pengajaran agama yang lebih berintikan kepada Iman dan meletakkan tujuan beragama, bukan untuk memperoleh kesejahteraan duniawi, melainkan untuk mencapai surga melalui ibadat sesuai dengan kaidah agama. Hal yang seperti itu berlaku pula pada masyarakat Kristen. Para pendeta mencoba menanamkan iman yang benar di kalangan pengikut mereka untuk memperoleh kelepasan dari dosa dan mencapai surga. Dalam hal itulah para pendeta berhadapan dengan segi-segi kehidupan seni budaya yang telah mendarah daging seperti *gondang* dan nyanyian yang sifatnya berisi pemujaan dan meditasi roh. Hal itu dilarang, tetapi kemudian setelah masyarakat Kristen di daerah ini dianggap dewasa dan telah faham akan arti iman yang sebenarnya, telah dapat pula membedakan mana adat dan mana agama, maka upacara adat dapat dilakukan dengan batas-batas tertentu.

Jika kita perhatikan lebih lanjut, maka ajaran agama Islam yang disampaikan para ulama di akhir abad XIX, begitu pula ajaran Kristen yang disampaikan oleh para pendeta, di sini terlihat sifat khusus yang menjadi titik berat ajaran ialah usaha individu untuk memelihara dari memelihara diri mereka, kemudian menye-

lamatkan keluarga mereka seterusnya kaum kerabat sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Di sini tersimpan segi pokok, yaitu kedudukan individu yang berhadapan dengan masyarakat sekitar. Individualisme religius (kebathinan) adalah inti ajaran yang mempengaruhi alam pikiran masyarakat yang telah menganut agama Islam dan agama Kristen.

Demikianlah alam pikiran dan kepercayaan penduduk di daerah Sumatra Utara ketika bersintuhan dengan kebudayaan Barat yang dibawa oleh orang Belanda baik melalui jalur pemerintahan maupun melalui jalur perusahaan partikulir. Pengaruh Barat menghendaki orang yang dapat bekerja untuk meningkatkan hasilnya di berbagai usaha. Mereka memerlukan individu yang dapat mereka pakai dalam berbagai usaha. Demikianlah orang Islam maupun orang Kristen di daerah ini yang tadinya telah memiliki benih individualisme yang menonjolkan segi prestasi, segi kedudukan, segi penghasilan, segi pendidikan yang menyebabkan mereka merasa dirinya berdiri sendiri di tengah masyarakat sekitarnya.

Tidaklah mudah menggambarkan alam pikiran dan kepercayaan penduduk pada masa itu. Tetapi patut diingat, bahwa abad XIX adalah masa peralihan, masa perkenalan dengan berbagai nilai baru dan masa orang mulai mencoba meninggalkan nilai lama. Akhirnya kita akan melihat bahwa secara formal orang ingin sekali kelihatan bahwa ia berpegang teguh pada pelaksanaan hidup mereka lebih berpikir untuk kepentingan diri sendiri.

Demikianlah alam pikiran seperti ini memungkinkan bagi lahirnya pribadi-pribadi yang kelak melepaskan diri sendiri.

Demikianlah alam pikiran seperti ini memungkinkan bagi lahirnya pribadi-pribadi yang tidak kelak melepaskan diri dari alam pikiran orang lain. Merekalah yang kita sebut sebagai pemimpin, mereka secara lahiriah terikat dengan keluarga, dengan sekampung, tetapi cara mereka menilai keadaan tidak sama dengan orang-orang lain. Mereka percaya bahwa apa yang mereka pikirkan itu lebih benar, walaupun terlalu banyak orang-orang lain berbeda pandangan dengan dirinya. Embrio dari pergerakan Kebangkitan Nasional telah lahir di tengah masyarakat itu. Banyak di antara mereka tidak kita kenal namanya, tetapi dapat dikenal lapisannya.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900 - 1928

A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH.

Untuk mengemukakan pengaruh politik etika di daerah Sumatra Utara, perlu kita gali akar-akar dari timbulnya politik etika itu sejak pertengahan abad XIX di Negeri Belanda. Kaum Liberal di negeri Belanda sejak pertengahan abad XIX telah berjuang untuk memperoleh hak-hak berusaha secara bebas di tanah jajahan. Hasil perjuangan mereka pada akhir abad XIX itu telah terlihat di Sumatra Utara dengan berdirinya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang diikuti oleh berbagai perusahaan lainnya di bidang perdagangan dan transportasi sebagaimana telah diutarakan pada bab yang lalu.

Kemajuan perusahaan itulah yang mendorong lahirnya politik etika, justru kondisi setelah abad XIX memerlukan berbagai tenaga pribumi bagi keperluan perusahaan, yaitu tenaga kasar (buruh, kuli) dan pegawai rendahan. Keinginan kaum modal ini sejalan pula dengan keperluan pemerintah kolonial pada masa itu yang semakin luas jaringannya dan memerlukan pula tenaga juru tulis. Keinginan yang sejajar itulah yang menyebabkan pemerintah kolonial memajukan pendidikan di daerah ini dengan membuka sekolah untuk memperoleh tenaga pribumi yang murah dan dapat mereka manfaatkan dalam memutar roda usaha dan pemerintahan di daerah ini. Demikianlah dua aspek dari politik etika itu, yaitu edukasi dan emigrasi (transmigrasi) berpengaruh di Sumatra Utara dalam bentuk pembukaan sekolah dan mendatangkan buruh dari pulau Jawa.

Mengenai pengaruh aspek ketiga dari politik etika, yaitu memajukan irigasi pengaruhnya di Sumatra Utara terlihat pada dua pola.

Di Daerah Sumatra Timur yang merupakan dataran rendah, yang dialiri oleh sungai-sungai yang banyak sekali, tumbuh usaha perkebunan atau *onderneming*. Dengan sendirinya usaha pertanian rakyat kurang penting bagi usaha eksploitasi kolonial di daerah ini. Irigasi diperlukan untuk mengeringkan

daerah ini dari bahaya banjir dan secara tidak langsung memberi akibat baik juga bagi kampung penduduk dan sawah serta ladang penduduk.

Di daerah Tapanuli yang telah lama mengenal sistem pertanian dan secara tradisional telah juga mengenal pengairan teratur, maka aspek ketiga dari politik etika itu tak lain dari usaha memajukan pertanian secara lebih baik. Dalam usaha itu diperbaiki benteng sungai (gadu), kemudian untuk mengawasinya pemerintah mengangkat pegawai untuk mengurus hal tersebut *mantri gadu.*

Sebagai akibat dari kegiatan politik etika yang terkenal dengan Trias Van Deventer itu, yaitu edukasi, irigasi dan emigrasi (transmigrasi), di daerah Sumatra Utara terlihat perubahan sosial sebagai berikut. Pertama, kita mulai mengenal di daerah ini lapisan masyarakat yang bekerja di perkebunan, di pelabuhan, dan tempat lain. Mereka adalah tenaga buruh kasar yang pada waktu itu disebut kuli. Kedua, di kantor perusahaan, kantor pemerintah kita kenal satu lapisan masyarakat yang kita sebut kerani. Di samping mereka itu bekerja lebih ringan mereka dipandang sebagai orang terkemuka. Ketiga, di desa muncul lapisan masyarakat petani maju. Mereka telah dapat menjual hasil pertanian karena pasar telah tumbuh. Mereka telah memiliki jenis kekayaan baru yaitu kekayaan uang. Kalau masyarakat tradisional diukur kekayaannya dengan sawah ladang serta ternaknya, maka sekarang uang telah menjadi ukuran baru bagi sekelompok kecil masyarakat di berbagai daerah.

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERGAYUTAN (RELEVAN) DENGAN KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH SUMATERA UTARA

Sejak dilaksanakan pemantapan kekuasaan kolonial di Sumatra Utara *(Koloniale Afronding Politiek)* oleh pemerintah Belanda, kelihatannya seluruh kekuasaan telah dikendalikan secara mantap pada umumnya keamanan telah terjamin, lebih-lebih setelah patahnya perlawanan Raja Sisingamangaraja tahun 1907. Pemerintah Kolonial Belanda telah menata kekuasaan secara sentral sejak pemerintahan Gubernur Jenderal Van Heutz.

Sistem pemerintahan itu yang terkenal dengan *Pax Neerlandica* mengatur pemerintahan bagi seluruh daerah jajahan

dengan menempatkan kekuasaan tradisional di bawah kekuasaan kolonial. Pada beberapa tempat di Sumatra Timur raja-raja dan sultan-sultan kekuasaannya telah diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi lembaga yang berfungsi bagi kepentingan kekuasaan kolonial. Di Tapanuli ditumbuhkan lembaga-lembaga pribumi seperti *Demang* dan *Kepala Kuria* yang juga berfungsi sebagai alat kekuasaan kolonial itu.

Dalam keadaan seperti itu, sepintas lalu kelihatannya situasi aman dan teratur *(rust en orde)* telah terlaksana. Namun demikian hal itu hanya fenomena yang ada pada permukaan, karena pada hakekatnya tiap penguasa pribumi sering juga menyadari hak-hak mereka yang telah berkurang atau makin susut dengan adanya kekuasaan kolonial di atas mereka. Walaupun para penguasa pribumi tidak selamanya melakukan perlawanan, malahan sering kelihatan sebagai pihak yang sangat patuh, tetapi tidak boleh kita melupakan sikap batin mereka atau di antara mereka yang tidak selamanya puas dengan makin meluas dan mendalamnya kekuasaan Belanda itu.

Gejala perasaan tidak puas itu sering terlihat pada lapisan tertentu, seperti gerakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Pakpak yang disebut organisasi Silimin. Di Siborong-borong dan Samosir disebut organisasi *Parhudamdam.* Organisasi perlawanan pengikut-pengikut Raja Sisingamangaraja itu menganut kepercayaan yang dikenal sebagai *Permalim.* Mereka percaya bahwa kesaktian Raja Sisingamangaraja itu tidak lenyap. Di daerah Labuhan Batu yaitu daerah Kualuh pemimpin mereka ialah Si Galung, Si Menten, Guru Ali, Mengolohon dan Olop. Perlawanan mereka dapat dipatahkan Belanda, tetapi Gerakan *Permalin* kelak menjelma menjadi aliran kepercayaan *Permalin* dan pengikut-pengikutnya menyebut agama *Permalin.*

Gerakan *Si Limin* adalah kekuatan gabungan antara pasukan-pasukan Raja Si Singamangaraja dengan pasukan-pasukan Aceh yang mengundurkan diri ke Dairi. Gerakan itu dipimpin oleh Acik Ali, Rapat Saran, dan lain-lain.

Penduduk di berbagai daerah telah melakukan perlawanan dalam bentuk lain, misalnya melawan untuk membayar belasting atau pajak, melawan untuk tidak melaksanakan rodi. dan lain-lain. Dalam perlawanan seperti ini muncul tokoh seperti Raja Koser Maha di Dairi. Di Tanah Karo terkenal perlawanan Mbergu Aaron, dan perlawanan yang dilakukan oleh

Datuk Besar di Sunggal juga bersumber kepada rasa tidak puas terhadap tertanamnya kekuasaan kolonial di daerah ini. Perlawanan seperti ini memakai metode perlawanan bersenjata, tetapi gerakan itu sebenarnya lebih luas dari gerakan bersenjata. Di dalamnya terdapat segi kepercayaan dan adat yang dipergunakan sebagai alat untuk mempersatukan kekuasaan menghimpun tenaga perlawanan rakyat.

Gerakan perlawanan tidak terbatas pada masyarakat desa, tetapi juga berlangsung pada masyarakat di daerah perkebunan, seperti yang dipimpin oleh Panglima Selen di Langkat, Raja Rondahaim di Simalungun.

Di kalangan para ulama kelihatannya ada golongan yang berfungsi sebagai penyokong kekuasaan raja. Oleh karena raja adalah alat kekuasaan kolonial, maka sekaligus juga para ulama seperti itu disadari atau tidak adalah sebagai alat yang ampuh bagi pengamanan stabilisasi kekuasaan kolonial. Sebagai reaksi kedudukan formal sebagian ulama yang menyadari kepalsuan kekuasaan raja-raja itu. Mereka menjauhkan diri dari kekuasaan formal, lalu membentuk organisasi tarikat seperti yang dipimpin oleh Syekh Abdul Wahab di Langkat, Syekh Baringin dan di berbagai tempat lain.

Setelah usaha perkebunan tertanam dengan pesatnya di Sumatra Timur maka usaha seperti itu akan diperluas juga ke Tapanuli. Di daerah ini kaum *planters* ingin memperoleh konsensi tanah guna perkebunan itu, tetapi masyarakat di Tapanuli tidak bersedia menyerahkan tanahnya. Supaya tanah-tanah di Tapanuli yang menurut adat di daerah ini berlaku hak ulayat, tidak jatuh ke tangan pengusaha perkebunan, maka beberapa pemimpin dipelopori oleh M.H. Manullang dan Alexander Sultan Sumurung melalui surat kabar *Suara Batak* yang terbit di Tarutung menganjurkan penduduk, agar menanami atau mengusahakan tanah mereka. Terkenal semboyan mereka dengan gerakan tiga "O", yaitu *Oela Tanom, Oelang Dibuat, Oelanda,* maksudnya "Kerjakanlah Tanahmu Supaya Tidak Diambil oleh Belanda". Dengan seruan seperti itu para pemimpin tadi berusaha mendorong penduduk bukan saja untuk memajukan pertanian, tetapi yang lebih penting ialah agar kekuasaan kolonial tidak mengexploitasi tanah-tanah pertanian milik penduduk melalui hak-hak konsesi. Pergerakan seperti ini, tak lain merupakan embrio yang bergayutan dengan Kebang-

kitan Nasional sesuai dengan kondisi daerah ini pada waktu itu.

Kegiatan lain yang merupakan usaha membangkitkan kesadaran rakyat ialah melalui tulisan di surat kabar. Beberapa surat kabar telah ada di daerah ini sejak akhir abad XIX, seperti *Imanuel, Suara Batak, Bintang Batak, Pewarta Deli, Tapian Nauli.* Penulis-penulis atau pemimpin redaksi surat kabar itu adalah pemimpin, karena tujuan penerbitan surat kabar itu merupakan usaha mencerdaskan kehidupan rakyat, dan mereka berjuang menentang ketidak-adilan kekuasaan kolonial.

C. INTERAKSI DAERAH DENGAN BERDIRINYA PARTAI/ORGANISASI.

Pada permulaan abad XX di tengah-tengah bangsa Indonesia telah muncul satu lapisan masyarakat yang dapat kita sebut sebagai golongan menengah. Ciri-ciri dari golongan ini ialah antara lain: telah memperoleh pendidikan Barat, terlepas dari ikatan tradisional, telah mengerti perkembangan suasana sekitarnya, mengenal ideologi, kerakyatan, dan secara lahiriah kelihatan pula dari cara hidup sehari-hari baik berpakaian maupun bertukar pikiran atau berinteraksi.

Golongan ini terdapat dari berbagai sumber asal, baik dari Jawa, Sumatra, Maluku dan sebagainya. Dan salah satu sifat yang utama dari mereka ialah keinginan yang sangat besar untuk memperoleh kemajuan. Ukuran kemajuan yang mereka ingini itu ialah persamaan dengan bangsa Barat, justru mereka merasakan ketidak-adilan dalam sistem penjajahan. Menghadapi ketidak-adilan ini, mereka pertama sekali menoleh kepada kaumnya sendiri. Mereka menyadari berbagai ketinggalan dikalangan sendiri, misalnya kebodohan, sikap menyerah kepada nasib, terikat kepada tradisi, kesalahan memahami agama, sikap feodal yang tidak memperhatikan kemajuan masyarakat, dan mereka berjuang untuk mengubah situasi seperti itu untuk mencapai kemajuan.

Bila kita perhatikan organisasi yang berdiri pada permulaan abad XX itu di Indonesia, seperti Budi Utomo, Serikat Islam dan lain-lain, maka sasaran perjuangan mereka tak lain adalah dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kebudayaan, agama, ekonomi, sosial, melalui metode modern yaitu dengan mem-

bentuk organisasi.

Telah menjadi kenyataan sejarah, bahwa Budi Utomo yang gagasannya dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo itu mendapat dukungan dari para mahasiswa Sekolah Dokter dibawah pimpinan Sutomo dan kawan-kawannya. Begitu pula Serikat Islam yang dipelopori oleh Haji Samanhudi itu mendapat dukungan dari golongan pribumi maju yaitu kalangan kaum dagang dan petani maju di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto. Begitu pula organisasi-organisasi lain yang semuanya berpusat di Jawa.

Bagi daerah Sumatra Utara perkembangan atau interaksi dengan organisasi-organisasi yang ada di Jawa itu terbatas oleh kondisi setempat yang berbeda-beda. Pada umumnya kehidupan berorganisasi di Sumatra Utara pada permulaan abad XX mendapat rintangan yang sangat berat.

Di Sumatra Timur pada permulaan abad XX itu tidak sedikit orang-orang terdidik yang ingin berjuang terutama melihat penderitaan kaum buruh atau kuli kebun. Tetapi kegiatan mereka sangat terhalang oleh kekuatan kaum modal Belanda. Di luar perkebunan juga terdapat halangan besar dari raja-raja atau penguasa pribumi yang tidak ingin akan perubahan. Mereka tidak ingin dirongrong oleh rakyatnya, justru mereka sendiri telah mendapat tekanan yang keras dari penguasa kolonial.

Di Tapanuli kegiatan organisasi itu mendapat tekanan dari penguasa setempat. Di samping itu peranan pendeta secara tidak langsung telah pula menanamkan rasa setia yang berlebih-lebihan kepada penguasa. Ada pepatah dari bahasa daerah yang menjadi motto masyarakat di sini sebagai berikut:

Baris-baris ni gaja di rura pangaloan
Molo marsuru raja dae do so oloan.

Maksud motto tersebut ialah bahwa jika penguasa atau raja menyuruh harus dituruti. Dengan perkataan lain, apa yang tidak direstui raja, tentu tidak boleh dilakukan. Demikianlah bahasa organisasi yang telah tumbuh di luar daerah .

Sumatra Utara tidak mendapat tanah yang subur di daerah ini. Adapun organisasi-organisasi yang tumbuh di tengah masyarakat secara struktural di daerah-daerah hanyalah Serikat *Tolong menolong, perwiridan,* dan pengajian di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Kristen adalah organisasi-organisasi seperti *Sintua Toba,* yaitu kumpulan para Sintua yang berpusat di Sigumpar. Organisasi ini tujuannya untuk kerjasama antara sesama Sintua dalam melaksanakan tugas. Di samping itu ada pula kegiatan tolong menolong secara anggota. Di kalangan rakyat biasa ada pula organisasi seperti *Punguan Saurmatua,* tujuan organisasi ini adalah serikat tolong menolong secara anggota dan memajukan kesejahteraan bersama. Baik Sintua Toba, maupun Saurmatua itu dasarnya adalah agama Kristen.

Walaupun secara struktural pada permulaan abad XX di Sumatra Utara tidak berdiri Budi Utomo, Serikat Islam dan lain-lainnya, tetapi segala kegiatan yang berlaku di Jawa selalu mendapat perhatian masyarakat di daerah ini. Surat-surat kabar, orang-orang yang belajar ke Jawa, dan pedagang-pedagang di kota selalu membicarakan dan menyebarluaskan kegiatan organisasi yang ada di Jawa itu. Demikianlah Budi Utomo, misalnya walaupun baru pada tahun 1924 berdiri cabangnya di Medan, tetapi kegiatan yang relevan dengan kegiatan Budi Utomo itu telah dilakukan orang di daerah ini, terutama di kalangan orang-orang yang berasal dari Jawa yang banyak hidup di perkebunan. Tokoh-tokoh ulama yang maju telah tertarik pula dengan gerakan Serikat Islam itu. Malahan pada daerah yang dikenal kolot seperti di pusat Tarikat Basilam sendiri pun pengaruh Serikat Islam itu ada. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan pada masa hidup beliau telah mengutus putra beliau Tuan Pakih Tambah untuk datang ke Jawa mengunjungi Corkoaminoto untuk mengantarkan sumbangan jemaah Tarikhat itu bagi gerakan Serikat Islam. Orang-orang seperti Dr. Pirngadi yang telah lama berdiam di Medan sebagai dokter ialah menyebarkan secara luas kegiatan Budi Utomo. Kemudian kegiatan untuk mempelajari kesusastraan klassik Jawa telah dilakukan di berbagai tempat, begitu pula kegiatan memajukan kesenian dan kebudayaan Jawa di kalangan orang Jawa di daerah perkebunan. Muhammad Samin telah diangkat sebagai Komisaris Serikat Islam bagi daerah ini sekitar sebelum Perang Dunia pertama. Komisaris di sini maksudnya untuk mengkoordinasi kader-

kader Serikat Islam yang berjuang di tengah masyarakat.

Sampai Perang Dunia pertama secara struktural belum dijumpai kegiatan organisasi sebagai bagian dari partai atau organisasi yang tumbuh di Jawa. Namun demikian gelombang kegiatan itu telah bergetar di Sumatra Utara, melalui kegiatan-kegiatan individu para pemimpin masyarakat.

1. Budi Utomo

Pertumbuhan Budi Utomo di Sumatra Utara dibawa oleh beberapa orang dokter yang bertugas di daerah ini seperti Dr. Pirngadi, Dr. Suraji, Dr. Abdul Manap. Malahan Dr. Sutomo yang terkenal dengan sebutan Pak Tom itu setelah tamat dari sekolah Dokter Jawa lalu bertugas di Lubuk Pakam (Deli Serdang). Pelopor-pelopor lain yang besar pengaruhnya ialah Pawiro Sumo, Sudarminto dan Yahja.

Faktor lain yang menyebabkan majunya organisasi itu ialah karena daerah Sumatra Timur itu daerah perkebunan dan di perkebunan itu banyak buruh yang berasal dari Jawa. Di kalangan orang yang berasal dari Jawa itulah organisasi budi Utomo memperoleh pengikut-pengikutnya.

Kegiatan utama dari Budi Utomo itu ialah mendirikan sekolah. Sekolah Budi Utomo yang pertama didirikan di Tebing Tinggi, kemudian menyusul sekolah-sekolah yang dinamai HIS Budi Utomo itu di Lubuk Pakam, Galang, Binjai, perdagangan, dan Medan. Sekolah-sekolah Budi Utomo (HIS Budi Utomo) itu sistemnya seperti sekolah Gubernemen. Malahan HIS Budi Utomo itu berusaha untuk menandingi sekolah Gubernemen. Banyak murid HIS Budi Utomo yang dapat mencapai hasil ujian yang sama baiknya dengan HIS Gubernemen.

Usaha lain dari Budi Utomo itu ialah memajukan kebudayaan yaitu mendirikan kelompok-kelompok kesenian seperti *Panembromo* (paduan suara), tarian Jawa, gamelan dan berbagai kesenian lain. Usaha yang penting pula ialah kegiatan mempelajari buku klasik seperti buku-buku tulisan *Mpu Kanwa,* Mpu Prapanca, Mangkunegara, Paku Buwana IV dan lain-lain. Buku-buku itu selain memiliki nilai kesusasteraan penting pula nilai-nilai susila yang terkandung di dalamnya.

Buku-buku itu sulit dipahami, oleh sebab itu peminatnya terbatas pada golongan tertentu saja dan orang yang paling dihormati karena pengetahuannya yang dalam tentang buku-

buku itu di daerah ini ialah Pawiro Sumo.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa pengikut Budi Utomo itu terutama di kalangan orang yang berasal dari Jawa, oleh sebab itu daerah pengaruh Budi Utomo di Sumatra Utara juga terbatas di daerah Sumatra Timur saja. Di daerah Tapanuli yang tidak ada perkebunan dan tidak banyak orang yang berasal dari Jawa disana, maka gerakan Budi Utomo itu tidak berkembang.

2. *Syarikat Islam.*

Ada beberapa hal yang penting kita kemukakan sehubungan dengan gerakan Syarikat Islam di daerah ini. Pertama, bahwa pengikut-pengikut Syarikat Islam itu terbatas pada golongan Islam intelektual. Mereka itu adalah para pedagang atau petani maju. Demikianlah, maka gerakan Syarikat Islam itu berkembang pada beberapa kota seperti Medan dan Sibolga, Pematang Siantar, Tanjung Balai. Di luar daerah itu bagi daerah Langkat Deli dan Serdang yang merupakan daerah Kesultanan dan pusat perkebunan Syarikat Islam tidak mudah bergerak. Tidak begitu halnya dengan daerah (Asahan dan Labuhan Batu) banyak kemudian perkebunan karet milik rakyat dan wajarlah dengan itu muncul pula pedagang-pedagang. Dengan cepat gerakan Syarikat Islam berkembang disana. Pengaruh ulama kaum tua juga menjadi faktor penghalang bagi Syarikat Islam, karena mereka lebih menitik-beratkan usaha pada kegiatan amal ibadat dalam arti yang terbatas dan sesuai dengan pola kehidupan feodal di daerah ini, maka gerakan Syarikat Islam yang bersifat politik itu mereka curigai dan tidak disenangi oleh raja-raja.

Komisaris Syarikat Islam yang pertama di Medan ialah Muhammad Samin. Figur ini sangat terkenal karena gerakannya tidak terbatas gerakan Islam, tetapi bayak berorientasi kepada memperjuangkan nasib buruh. Tan Malaka yang telah bekerja di sekolah perkebunan Tanjung Morawa tahun 1919 selama di Sumatra Utara tidak memperlihatkan kegiatan politik, walaupun setelah pindah ke Jawa pada tahun 1921 bersama dengan Semaun dan Dharsono menyusup ke dalam Syarikat Islam.

Tokoh Syarikat Islam di Pematang Siantar ialah H. Nuli Said, Tokoh Syarikat Islam di Asahan dan Labuhan Batu ialah Muhammad Saleh dan beliau lama sekali memangku jabatan sebagai Komisaris Syarikat Islam di Sumatra Timur. Tokoh ini

bergerak terus di daerah ini sampai zaman kemerdekaan memimpin Partai Syarikat Islam Indonesia.

Di daerah Tapanuli Syarikat Islam itu hanya berkembang di sekitar Sibolga, karena daerah Tapanuli Utara umumnya orang Kristen, sedang di Mandailing kekuatan tradisional kepala-kepala Kuria tidak memberi kemungkinan bagi pergerakan Syarikat Islam itu.

Setelah ke dalam Syarikat Islam itu menyusup orang-orang Komunis, maka perlawanan kaum reaksioner (Kolonial dan Feodal) terhadap Syarikat Islam semakin kuat dan gerakan Syarikat Islam itu dengan mudah disamakan dengan Komunis. Hal itulah yang menyebabkan gerakan Syarikat Islam itu lama kelamaan kurang pengaruhnya di daerah ini.

3. Indische Partij.

Organisasi ini didirikan oleh Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo di Bandung pada tahun 1911. Kegiatan organisasi ini sangat penting bagi perjuangan nasionalisme Indonesia walaupun usia partai itu sangat pendek, yaitu pada tahun 1913 partai itu dibubarkan. Garis nasionalisme sebagai alat perjuangan diletakkan dengan tegas dan pengertian nasionalisme *Indische Partij* itu adalah garis yang kuat, karena tidak membedakan asal-usul keturunan, serta kepercayaan atau agama. Jika ide seperti itu berkembang, tentu semua orang Belanda dan siapa saja yang merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia akan berjuang bagi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Secara struktural organisasi *Indische Partij* itu tidak tertanam di Sumatra Utara, tetapi seluruh kegiatan *Indische Partij* itu dapat diikuti oleh pemimpin-pemimpin di daerah ini melalui surat kabar. Pokok-pokok pikiran Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) demikian tenarnya di daerah ini dan menjadi studi bagi pemimpin dan calon pemimpin.

4. Muhammadiyah.

Perkembangan Muhammadiyah di Sumatra Utara dibawa oleh orang-orang yang datang dari luar daerah ini, seperti dari Jawa dan Minangkabau. Kegiatan Muhammadiyah tidak mendapat tempat di kalangan penduduk asli suku Melayu. Ula-

ma-ulama dari daerah ini tidak menyukai keyakinan kaum muda dan ulama dari daerah ini (Langkat, Deli dan lain-lain) tergolong kepada kaum tua. Mereka tidak menyetujui gerak Muhammadiyah karena hal-hal yang dianggap bid'ah oleh Muhammadiyah telah lama berurat berakar di kalangan penduduk di daerah ini seperti kenduri di waktu kematian, talkin dan sebagainya. Ulama-ulama di Sumatra Timur dan Tapanuli Selatan tidak dapat menerima anggapan itu, karena dalam pegangan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang umumnya berpengaruh di daerah ini telah membenarkan adat kebiasaan itu sebagai amal yang sah.

Oleh beberapa saudagar Islam yang berasal dari Sumatra Barat antaranya Juin Sutan Pangulu, Sutan Saidi Jamaris, Dt. Bungsu dilangsungkanlah suatu musyawarah penting di jalan Nagapatam No. 44 yang lebih terkenal dengan Kampung Keling Medan pada tanggal 25 Nopember 1927. Tujuan musyawarah itu ialah untuk membangun Muhammadiyah di daerah ini dan sebagai pengurusnya yang pertama dipilih Hr. Muhammad Said, Mas Pono Sastro, Rd. Karto Utoyo, A. Wahid Har.

Oleh karena pusat Gerakan Muhammadiyah itu di Yogyakarta dengan sendirinya juga pelopor-pelopor Muhammadiyah disini adalah orang-orang yang berasal dari daerah itu. Lain dari orang-orang yang berasal dari Jawa maka orang-orang yang berasal dari Sumatra Baratlah yang paling banyak mengikuti Gerakan Muhammadiyah di sini.

Cabang-cabang Muhammadiyah umumnya pada zaman itu didirikan di kota seperti Pancur Batu tokohnya St. Khalifah, Tebing Tinggi tokohnya M. Zain Jambek, Tanah Jawa tokohnya Said Ali, Kasaran tokohnya Durah Marah Sulaiman, Pematang Siantar tokohnya ialah Haji Ibrahim Adam, Tanjung Balai tokohnya Abdul Hamid Mahmud, Binjai Abas Abisin. Malahan ke daerah Kabanjahe Muhammadiyah telah berdiri di tengah orang-orang Kristen dan orang-orang yang berkepercayaan Pelbegu yang dipelopori oleh Abdul Razak Amini.

Kegiatan Organisasi ini terutama dalam bidang amal ibadah. Hal itu dilaksanakan dengan tabligh atau dakwah. Majelis Dakwah (Tabligh) mengurus soal-soal agama kemudian di bidang Sosial bergerak di bidang kesejahteraan anak yatim dan bantuan sosial kepada fakir miskin. Seterusnya majelis pendidikan mereka membangun sekolah. Sekolah Muhammadiyah

merupakan gabungan antara sekolah agama (madrasah) dengan sekolah umum. Oleh sebab itu di samping madrasah Muhammadiyah juga membangun HIS Muhammadiyah.

5. *Taman Siswa.*

Perguruan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan tidak boleh dipandang sebagai sekolah-sekolah belaka, karena kegiatan pendidikan bagi Taman Siswa hanyalah sebagai metode bagi perjuangan kebangsaan. Sekolah Taman Siswa selain mempunyai metode yang berbeda dengan sekolah Gubernemen yaitu dengan sistem among dan pondok juga menggariskan tujuan pendidikan nasional.

Di Sumatra Utara perguruan Taman Siswa mulai dengan sekolah Budi Utomo. Hampir semua sekolah Budi Utomo kemudian diubah menjadi sekolah Taman Siswa sejak tahun 1929. Hanya sekolah Budi Utomo di Medan yang tidak menjadi Taman Siswa lalu dibawah pimpinan Pak Munar S. Hamijoyo menjadi *Neutrale HIS.*

Pelopor Sekolah Taman Siswa di Sumatra Utara ialah Sugondo Kartoprojo yang datang ke daerah ini pada tahun 1929 Cabang-cabang Taman Siswa berdiri di berbagai kota seperti Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Galang, Perdagangan, Kisaran, Tanjung Balai, Rantau Prapat, Binjai, dan lain-lain. Daerah ini umumnya juga daerah yang dilingkari oleh tanah-tanah perkebunan *(onderneming).* Walaupun Taman Siswa itu bersifat nasional, tak mudah kita lupakan kalau pada mulanya Perguruan Taman Siswa itu lebih populer di kalangan orang yang berasal dari Jawa. Lebih-lebih lagi bahwa guru-guru *(Pamong)* Taman Siswa itu adalah orang-orang yang telah dididik di Taman Guru Taman Siswa *(Kweekschool)* di Jogyakarta.

Di bidang sosial Taman Siswa juga bergerak di kalangan keluarga seperti Pelajar Taman Siswa, Wanita Taman Siswa. Semua organisasi itu berdasarkan kebangsaan. Pendidikan Taman Siswa adalah pendidikan kebangsaan. Berbeda dengan sekolah Budi Utomo yang berusaha mencapai penyamaan dengan Sekolah Gubernemen, maka Sekolah Taman Siswa sebaliknya berusaha untuk membedakan diri dengan Sekolah Gubernemen. Mereka mencari kepribadian sendiri dengan memakai bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia sebagai alat pengajaran bagi pendidikan kebangsaan.

Akibat pendidikan seperti itu pada zaman kolonial tamatan Taman Siswa tidak disukai baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun oleh pengusaha partikulir. Mereka tidak suka memakai tamatan Taman Siswa sebagai pegawai negeri ataupun sebagai employe. Hal itu kelihatannya menyulitkan, tetapi sebagai umpan balik dari kegiatan Taman Siswa itu ialah bahwa para tamatannya lebih percaya kepada diri sendiri dan berusaha untuk berdiri di atas kaki sendiri. Anak-anak Taman Siswa tidak belajar untuk menjadi *ambtenar Binenlands Bestuur* (pegawai BB), tetapi mendidik diri untuk menjadi manusia yang dapat berdiri sendiri dengan swa-usaha.

6. *Organisasi Kepemudaan.*

Di samping organisasi yang disebutkan di atas, maka sikap keorganisasian di tanah air kita pada permulaan abad XX itu juga diliputi oleh pikiran kedaerahan. Demikianlah di samping Budi Utomo berdiri pula organisasi Pasundan, Serikat Sumatera, Rukun Minahasa dan lain-lain. Kemudian berdiri pula organisasi pemuda yang mengikuti organisasi di kalangan orang tua. Tri Koro Dharmo sebagai organisasi pemuda yang tertua yang didirikan pada tahun 1915. Sebagai perkembangan organisasi-organisasi Pemuda itu berdiri pula organisasi *Jong Java* yang lahir dari perubahan nama Tri Koro Dharmo, lalu *Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon,* Pemuda kaum Betawi dan lain-lain. Salah satu organisasi pemuda yang kuat pada zaman itu ialah *Jong Islamieten Bond* yang didirikan oleh Syaman Rizal pada tahun 1924.

Semua organisasi ini bergerak di Jawa yang dipelopori oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah yang belajar di Jawa. Demikianlah pelajar-pelajar dari Tapanuli yang belajar di Jawa tak luput dari usaha mendirikan organisasi pemuda yang disebut *Jong Batak* di bawah pimpinan Amir Syarifuddin.

Di samping itu berdiri pula organisasi kepanduan yang mendampingi organisasi kepemudaan itu. Bagi daerah Sumatra Utara, maka organisasi pemuda dan kepanduan itu berdiri pula pada berbagai tempat, terutama di kota Medan. Organisasi-organisasi itu bagi daerah ini barulah kemudian mencapai kemajuan, yaitu sesudah Sumpah Pemuda tahun 1928. Organisasi-organisasi pemuda yang terdapat di daerah ini antaranya ialah organisasi *Jong Islamieten Bond,* Indonesia Muda. Kedua organisasi

inilah yang terkuat.

Jong Islamieten Bond dengan organisasi Kepanduannya terkenal pula Natipij *(National Padvinderij)* dengan tokoh-tokohnya seperti Sulaiman Hasibuan, Pengaran Siregar, Dasuki, M. Saleh Arif. Organisasi Indonesia Muda yang berkantor di jalan Ampelas, Medan dipimpin oleh Mursan. Tokoh-tokoh Indonesia Muda juga mendirikan kepanduan Inpo *(Indonesia Padvinder Organisatie)* yang umumnya dibina oleh pamong-pamong Taman Siswa seperti Pak Munar, Baginda Sojuangon, yang selalu memakai kacu Merah Putih. Mereka itu adalah calon-calon bagi anggota Indonesia Muda. Organisasi Kepanduan yang dibawah Muhammadiyah adalah Hizbul Wathan yang mulanya dipimpin oleh Hasan Halim dan berpusat di kampung Madras, Medan.

Organisasi pemuda yang lain yang pernah berdiri di Medan ialah pemuda Muslim Indonesia yang dipimpin oleh M. Yunan Nasution dan berkantor di jalan Teratai Medan, Pandu Islam yang berpusat di Mesjid lama dan dipimpin oleh Malim Mukmin, Al Hilal adalah juga organisasi kepanduan yang menurut cerita orang-orang dahulu berpusat di Emma Straat atau jalan Jose Rizal sekarang ini. Kemudian pada bagian pemuda-pemuda di gereja terdapat organisasi *Naposo Bulung* yang bergerak di bidang agama dan memberi latihan kerohanian bagi kaum muda.

Pada umumnya organisasi pemuda itu di daerah ini merupakan organisasi kegiatan pemuda yang sebagian besar waktunya dipergunakan untuk belajar. Namun demikian mereka sebagai kaum muda yang mulai sadar maka mereka membangun organisasi untuk membina usaha hubungan sosial yang baik sesama pemuda dan memajukan berbagai bidang kehidupan pemuda seperti kesenian, dan olah raga serta juga organisasi kepanduan. Dalam daerah-daerah yang jauh dari kota, maka tingkat pendidikan yang sangat rendah tidak memungkinkan bagi mereka untuk membangun organisasi seperti pada kota-kota besar.

7. *Organisasi Gereja*

Gereja sebagai lembaga di tengah masyarakat dapat dipandang dari dua segi. Pertama sebagai jemaat dan kedua sebagai organisasi. Sebagai organisasi, maka *Jemaah Huria Kristen Ba-*

tak Protestan yang didirikan pada tahun 1881 di Sipirok kemudian mengambil tempat Pearaja Tarutung sebagai pusat. Pemindahan itu sesuai dengan perkembangan agama Kristen yang semakin pesat di Tapanuli Utara.

Pada mulanya jemaah-jemaah Kristen itu dipimpin oleh pendeta-pendeta missi R.M.G. dari Jerman. Kemudian setelah berkembang pendidikan bagi calon-calon pendeta dari pribumi, maka lahirlah pendeta-pendeta yang berasal dari orang Batak. Sekolah Pendeta telah dibuka pada tahun 1883 dengan pelajar-pelajar yang pertama sekali ialah Johannes Siregar, Marcus Siregar dan Petrus Nasution.

Sesuai dengan perkembangan kesadaran dari pendeta-pendeta pribumi itu, maka sebagian dari mereka kelak merasakan, bahwa mereka hendaknya lebih bebas berorganisasi yang terlepas dari bimbingan pendeta-pendeta yang berasal dari Jerman. Hal itu sejalan juga dengan perkembangan pergerakan kebangsaan di tanah air kita yang menuntut kemerdekaan. Demikianlah berdirinya organisasi *Hatopan Kristen Batak* pada tahun 1930. Hatopan Kristen Batak itulah yang kemudian berubah menjadi *Huria Kristen Indonesia* (HKI) yang berpusat di Tarutung.

8. Organisasi-organisasi Islam.

Al Jamiatul Washliyah adalah organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 30 Nopember 1930 di Medan. Pada mulanya organisasi itu berasal dari perhimpunan *debating club* antara pelajar-pelajar Makhtab Islamiyah Tapanuli. Kemudian organisasi itu meluas menjadi satu badan yang sangat besar pengaruhnya di Sumatra Utara dan sampai sekarang berpusat di Medan. Pelopor-pelopor organisasi ini ialah Ismail Ibnu Banda, A. Rahman Syihab, M. Arsyad, Th. Lubis, Adenan Nur, H.M. Yacub, H. Syamsuddin dan A. Yusuf Ahmad Lubis. Kegiatan organisasi Al Jami'atul Washliyan itu terutama di bidang pendidikan dan amal sosial. Dalam hal ini kepengurusan Al Jami'atul Washliyah di bagi atas berbagai bidang seperti Majelis pengajaran dan Majelis yatim Piatu.

Organisasi-organisasi agama Islam itu sebenarnya banyak dan masing-masing berdiri sendiri. Kegiatan utama dari organisasi itu di bidang pendidikan dan mendirikan madrasah. Sebuah madrasah bukan saja sebagai sekolah yang mengajar-

kan agama, tetapi juga sebagai pembinaan kader pemimpin bangsa dan agama.

9. Organisasi Wanita.

Di samping organisasi yang disebut di atas, maka tiap organisasi itu juga diperlengkapi dengan bagian Wanita seperti Wanita Utomo adalah bagian Wanita dari Budi Utomo. Kemudian di Taman Siswa juga dikenal Wanita Taman Siswa, Aisyiah adalah organisasi Wanita Muhammadiyah. Disamping itu terdapat pula organisasi lain seperti Keutamaan Isteri. Pada Kongres Wanita tahun 1935 Keutamaan Istri dari Medan telah mengutus utusannya. Pada tahun 1938 di Medan terdapat pula organisasi *Kaum Ibu Sepakat* yang dipimpin oleh Nyonya Pulungan dan berkantor di jalan Rumah Sakit.

D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 - 1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD.

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda Sekitar Perang Dunia I

Sampai sekitar Perang Dunia Pertama Pemerintah Hindia Belanda telah mengatur administrasi pemerintahannya di daerah-daerah yang sudah dianggapnya dapat menerima *Pax Neerlandica.* Demikianlah Sumatra Utara yang terdiri dari dua Keresidenan itu ditempatkan di bawah Gubernur di Medan telah ada sejak tahun 1887, dan membawahi seluruh Keresidenan yang terdapat di Sumatra.

Residen merupakan penguasa tertinggi di wilayah Keresidenan. Residen Sumatra Timur berkedudukan di Medan dan Residen Tapanuli berkedudukan di Sibolga. Residen Sumatra Timur mengepalai beberapa Asisten Residen dan tiap Asisten Residen mendampingi Swapraja *(Landschap).* Lain halnya dengan daerah Tapanuli. Disana Residen mengepalai beberapa Asisten Residen dan tiap Asisten Residen itu benar-benar mempunyai kekuasaan di wilayahnya. Asisten Residen itu mengepalai Afdeeling. Hal itu disebabkan oleh karena susunan pemerintahan tradisional di Tapanuli tidak mengenal adanya Kerajaan-kerajaan.

Rakyat di Tapanuli langsung diperintah oleh penguasa Kolonial melalui Kepala-kepala Negeri. Di Sumatra Timur di samping pemerintah Gubernemen terdapat kekuasaan *Lands-*

chap (raja-raja).

Perbedaan itu mengakibatkan sikap yang berbeda-beda terhadap Belanda. Rakyat di Tapanuli lebih bersifat homogen sikapnya terhadap Belanda jika dibandingkan dengan sikap rakyat di Sumatra Timur. Kelompok-kelompok penduduk di Sumatra Timur dapat kita bagi-bagi atas beberapa kelompok, yaitu kelompok masyarakat buruh di perkebunan, masyarakat yang dikuasai sultan-sultan di beberapa kerajaan seperti Langkat, Deli, Asahan dan seterusnya, kemudian kelompok masyarakat pedalaman yang dikuasai oleh raja-raja kecil seperti yang terdapat di Simalungun dan Karo.

Sikap pemerintah kolonial terhadap penduduk di Sumatra Utara juga berbeda-beda sesuai dengan bentuk kelompok yang dihadapinya. Terhadap kuli perkebunan pemerintah Belanda tidak secara langsung menguasainya, karena sebenarnya mereka itu dikuasai oleh kaum *ondernemers*. Kaum *Ondernemers* melalui *Koelie Ordonnantie* menjadikan kaum buruh sebagai sapi perahan dan mengisolasikan kehidupan kaum buruh itu dari perkembangan masyarakat sekitarnya. Tujuan mereka ialah menjadikan kelompok buruh itu turun temurun menjadi kaum pekerja.

Terhadap rakyat yang diperintah oleh raja-raja di Sumatra Timur pemerintah Belanda juga tidak langsung mengatur peri kehidupan sehari-hari. Hal itu diserahkan kepada raja sesuai dengan tradisi atau adat setempat. Hal itu berlaku bagi masyarakat di kesultanan maupun di kerajaan-kerajaan pedalaman seperti di Simalungun dan Tanah Karo. Di Tapanuli pemerintah kolonial pengamanan diserahkan pemerintah kepada Kepala Negeri dan dalam urusan tata kehidupan sehari-hari diatur oleh gereja.

Perang Dunia pertama yang berlangsung di Eropah 1914 - 1918 tidak melibatkan secara langsung Negeri Belanda. Namun demikian keadaan peperangan itu menyebabkan Belanda selalu waswas kalau-kalau ada di antara negara yang berperang itu melanggar batas negaranya. Maka oleh karena itu tentunva Belanda mengkoordinasi kekuatannya di bidang politik dan Angkatan Bersenjata. Belanda berusaha agar di negerinya dan di tanah jajahannya jangan terjadi gangguan keamanan dan kekacauan politik. Berhubung dengan itu pemerintah Hindia Belanda berusaha agar jangan timbul gangguan keamanan, justru

pada waktu perang itu ada berbagai hal yang mempengaruhi keadaan yang memungkinkan timbulnya rasa tidak senang antaranya harga-harga barang impor naik. Kenaikan harga barang-barang itu bagi daerah Sumatra Utara terutama bagi daerah Sumatra Timur terasa sekali. Daerah perkebunan umumnya mendatangkan beras dari luar negeri dan harga beras sangat tinggi. Begitu pula bagi daerah perkebunan rakyat terasa kegelisahan karena harga-harga barang yang diperlukan penduduk sangat tinggi dan tidak tercapai oleh penduduk. Pemerintah kolonial takut jika kenaikan harga barang-barang itu dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin pergerakan nasional sebagai motif perjuangan mereka. Itulah sebabnya pemerintah kolonial pada masa Perang Dunia pertama itu sangat hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahannya. Residen, Asisten Residen sampai ke tingkat bawah selalu berusaha menjaga ketertiban dan berusaha membatasi kemungkinan-kemungkinan meluapnya rasa tidak puas di kalangan rakyat.

2. *Keadaan Masyarakat.*

Masyarakat Pedesaan di Indonesia hidup sebagai petani miskin. Hal itu tidak banyak berubah sejak diintensifkannya kekuasaan kolonial Belanda. Malahan perubahan menyebabkan rakyat semakin terjepit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayar pajak. Di Sumatra Timur kemiskinan petani desa itu diakibatkan oleh semakin diperluasnya areal perkebunan *(onderneming)*. Banyak tanah penduduk yang subur dan baik dijadikan perkebunan, sehingga petani terdesak kepedalaman atau kehilangan tanah-tanah yang selama ini diusahakannya.

Seyogianya penduduk ini dapat ditampung di lapangan pekerjaan baru sebagai buruh atau kuli. Keberatan untuk menjadi kuli disebabkan pekerjaan yang sangat berat dan kedudukan mereka yang selama ini sebagai petani yang jauh lebih merdeka dibandingkan sebagai kuli dengan tata hidup yang keras.

Kuli-kuli perkebunan yang didatangkan dari Jawa sebenarnya cukup memperoleh bahan makanan yang disalurkan oleh perkebunan-perkebunan melalui leveransir. Tetapi ditinjau dari berbagai sudut, kehidupan kaum buruh itu sangat terikat oleh kontrak-kontrak yang selalu diperpanjang dan praktis mereka tidak mungkin meninggalkan pekerjaan itu untuk

mengubah nasib dengan mata pencaharian lain. Kaum kuli telah dibiasakan hidup royal pada hari gajian dan dengan demikian selalu berkekurangan lalu setiap kali terpaksa memperpanjang kontrak untuk memperoleh panjar atau uang muka. Selanjutnya kaum buruh dieksploitasi agar memproduksikan sebanyaknya hasil perkebunan sebagai imbalan terhadap barang-barang impor yang semakin meningkat.

Demikianlah kenaikan harga-harga barang makanan pada masa Perang Dunia I kesulitan-kesulitan dirasakan bukan saja oleh kaum kuli, tetapi juga oleh penduduk di Sumatra Timur, justru penduduk itu bergantung kepada keadaan kaum buruh yang tinggal di sekitar mereka.

Di daerah pedalaman Simalungun dan Tanah Karo orang mulai berdagang oleh karena hidup sebagai bertani saja dirasakan berat. Ada juga di antara mereka yang mencari pekerjaan sebagai pegawai. Hidup sebagai pegawai sangat menyenangkan dibandingkan dengan sebagai petani dan buruh.

Di daerah Tapanuli pada umumnya masyarakat hidup sebagai petani. Sedikit di antara mereka telah mulai berdagang. Pekan-pekan telah dibuka dan di antara mereka ada juga yang hidup sebagai pegawai.

Banyak di antara penduduk meninggalkan kampung-halaman, karena tidak sebanding hasil yang mereka peroleh dengan kebutuhan yang makin lama juga semakin meningkat. Banyak di antara mereka pergi ke Sumatra Timur. Mereka bekerja sebagai di perkebunan dan juga sebagai guru. Mereka sebenarnya lebih beruntung secara umum di bidang pendidikan dan hal itu ada hubungannya dengan usaha baru bagi memperoleh mata-pencaharian.

Jika ditinjau kehidupan masyarakat Sumatra Utara, maka dapat kita lihat perbedaan kehidupan masyarakat pedalaman dan pesisir. Hal itu telah berjalan sejak zaman dulu. Di samping itu sejak adanya pengaruh Barat dengan tumbuhnya kota-kota, maka kelihatan pula sekarang mulai adanya perbedaan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Orang-orang di Sumatra Timur misalnya, walaupun semuanya itu di pesisir, tetapi sekarang telah berbeda kedudukan masyarakat pedesaannya dengan masyarakat kota seperti Medan, Tanjung Balai, dan lain-lain. Begitu pula di Tapanuli. Walaupun seluruhnya di pedalaman, tetapi sejak adanya pengaruh Barat telah terasa adanya perbedaan antara penduduk desa seperti penduduk Lobu Sikkam (desa) dengan penduduk kota

Tarutung. Perbedaan itu terdapat pada pandangan masyarakat dan juga terdapat pada cara hidup serta sikap sehari-hari. Walaupun demikian jika daerah itu penduduknya masih homogen seperti di Tapanuli, Tanah Karo, Simalungun, maka sikap penduduk kota dan penduduk desa terhadap adat-istiadat masih sama. Berbeda halnya dengan penduduk kota yang heterogen seperti di Sumatra Timur. Di sini penduduk kota itu terdiri dari berbagai suku dan malahan berbagai bangsa (Cina, Arab, India, Eropa) dan penduduk desa mempunyai adat-istiadat yang berbeda dengan penduduk kota itu. Perbedaan itu lebih nyata lagi karena perbedaan penguasa. Penduduk desa di kesultanan sangat terikat oleh sistem feodal dan sedikit sekali kebebasan mereka. Daerah yang langsung dikuasai oleh pamong praja Belanda seperti di Tapanuli di ikatan feodal itu tidak ada yang menyebabkan mereka lebih bebas dalam cara berpikir dan untuk mengubah nasib mereka.

Lain dari itu kelihatan pula perbedaan kedudukan kaum buruh dengan pekerja lepas. Walaupun kedua kelompok ini sama-sama bekerja berat untuk memperoleh penghasilan, tetapi dari sudut sosial buruh lepas itu lebih tinggi kedudukannya. Kaum buruh di perkebunan yang terkenal dengan kuli kontrak sangat terikat pada peraturan ondernieming. Banyak kebiasaan buruk yang sengaja dibiarkan malah didorong untuk berkembang pada masyarakat buruh, antaranya kebiasaan berjudi. Tiap-tiap gajian kecil (tanggal 14-15 tiap bulan) dan gajian besar (tanggal 30-31 tiap bulan) dibebaskan orang main judi di perkebunan. Hal itu sebenarnya salah satu usaha kaum *ondernemers* untuk menahan kaum buruh jangan pulang ke kampung mereka. Jika mereka kalah dalam berjudi, terpaksa mereka meminjam ke perkebunan dan hal itu berarti semakin lama mereka terikat hidup di kebun, malahan sampai turun-temurun. Jika pun pada satu saat seseorang telah memperoleh keuntungan atau kemenangan, tetap juga Orang itu tidak diperkenankan membayar hutang-hutangnya dengan uang tetapi, harus membayarnya dengan tenaga atau memperpanjang kontrak.

Tempat tinggal yang disediakan untuk buruh perkebunan ialah rumah-rumah bangsal yang didiami oleh beberapa (sampai empat puluh) keluarga. Hal itu dapat menyebabkan merosotnya tata susila dan norma-norma hidup lainnya. Keadaan itulah yang menyebabkan pendapat umum di luar perkebunan memandang rendah kepada kaum buruh perkebunan.

Penduduk desa baik di pedalaman maupun di pesisir sebenarnya tidak banyak berubah dari kehidupan nenek-moyang mereka. Mereka selalu terikat akan desanya akan kampung-halamannya. Perjalanan paling jauh hanya dilakukan mereka ke pekan-pekan yang didatangi sekali seminggu. Itu pun hanya beberapa orang desa yang pergi ke pekan, lalu penduduk yang lain menitipkan pembelian atau penjualan barang-barangnya kepada orang-orang yang bepergian ke pekan itu. Dengan demikian jelaslah, bahwa tiap desa masih terpisah dari lingkungan yang agak luas dan umumnya penduduk desa tidak mengenal keadaan di daerah lain. Adat kebiasaan yang telah ada sulit ditinggalkan dan merupakan tabu jika dilanggar. Jadi masyarakat desa itu adalah masyarakat yang statis.

Sejalan dengan semakin luasnya dan mendalamnya kekuasaan Belanda di Sumatra Utara, maka diperlukanlah pegawai-pegawai rendahan yang tak perlu dipegang oleh orang Belanda. Begitu pula perusahaan-perusahaan sekarang diperlukan juga pegawai seperti itu. Dengan demikian pemerintah telah membuka beberapa sekolah seperti sekolah desa, dan sekolah sambungan. Di beberapa kota telah dibuka sekolah dengan bahasa Belanda (HIS). Di Tapanuli pembukaan sekolah-sekolah itu dilakukan oleh misionaris. Sekolah di sana lebih maju, karena jika pada umumnya sekolah bagi Bumiputra itu adalah sekolah sambungan dua tahun, maka oleh missionaris telah dibuka sekolah-sekolah yang sama tingkatnya dengan sekolah Barat yaitu tujuh tahun. Bagi sekolah-sekolah ini ternyata telah membawa akibat kepada cara berpikir dan berguna pula sebagai peningkatan jasa guna memperoleh mata-pencaharian baru. Lain dari itu pemerintah Kolonial telah memanfaatka sekolah-sekolah itu untuk memperlancar roda pemerintahan, karena diharapkan rakyat dapat memahami perintah-perintah yang disampaikan secara tertulis antaranya mengenai *belasting* atau pajak.

Di beberapa kota seperti Medan, Pematang Siantar, Binjai, Tarutung, Sibolga, Sidempuan, dan lain-lain, penduduk mengagumi cara hidup orang Barat yang dianggap lebih unggul. Banyak di antara penduduk mulai meniru cara berpakaian dan cara mengatur rumah-tangga seperti orang Barat. Melalui penduduk kota tadi kebiasaan tersebut meluas ke desa-desa.

Bahasa Belanda dianggap lebih penting dan menjadi ukuran bagi golongan orang penting yang terkemuka. Golongan yang te-

lah menguasai bahasa Belanda atau "berbudaya." Jika telah mengenal cara hidup Barat itulah ukuran bagi penduduk kota dan jika belum hal ini pulalah yang dijadikan ukuran bagi penduduk desa. Bagaimanapun jumlah orang yang berkesempatan dan kesanggupan memperoleh pendidikan belum meluas.

Walaupun keinginan sangat besar untuk kemajuan menurut ukuran Barat itu masih tetap juga masyarakat menilai lebih tinggi terhadap kebiasaan tradisional. Tentu ada di antara mereka yang telah demikian maju, tetapi pada umumnya masyarakat terutama di desa masih tetap menghargai nilai-nilai budaya nenek-moyang mereka.

Pada permulaan masa penjajahan Belanda ke Sumatra Utara peluasan penyiaran agama Kristen telah berlaku dari Tapanuli ke Simalungun, Dairi, dan Pak-pak. Kemudian agama Kristen telah meluas pula ke Tanah Karo. Penyiaran agama Kristen ke Tanah Karo dilakukan oleh Missi dari Negeri Belanda. Di pedalaman itu, yaitu Toba, Simalungun, Karo, Pak-pak, dan Dairi sejak itu sebagian besar penduduk beragama Kristen dan sebagian lagi masih beragama Pelbegu dan Permalim. Kemudian setelah terjadi hubungan antar suku dan daerah perantauan, masuk pula agama Islam ke beberapa kampung di daerah ini.

Di daerah pesisir umumnya penduduk beragama Islam, tetapi di kota-kota sebagai akibat lajunya perpindahan penduduk telah ada pula orang yang beragama Kristen. Malahan kemudian juga agama-agama lain. Umumnya penduduk Karo yang pindah ke pesisir (Langkat, Deli) memeluk agama Islam dan mereka menyebut diri mereka sebagai Melayu. Begitu pula orang-orang Batak yang pindah ke pesisir timur, Asahan, Labuhan Batu memeluk agama Islam dan juga sering pada zaman dulu tidak menyatakan diri mereka lagi sebagai orang Batak. Barulah kemudian ini saja mereka itu memakai marga kembali.

3. Hubungan Dengan Volksraad

Menghadapi Perang Dunia I pemerintah Belanda khawatir jika akibat peperangan itu mempengaruhi kedudukan mereka di tanah jajahannya, yaitu Indonesia. Lebih-lebih karena di dalam mengkonsep syarat-syarat perdamaian dunia sebagai yang dikemukakan oleh Presiden Wilson dari Amerika Serikat termuat salah satu pasal yang penting, yaitu *The Right of Self Determination.*

Khawatir akan bahaya pengaruh pandangan itu, maka peme-

rintah Belanda membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang terkenal dengan *Volksraad.* Pada mulanya sejak dibentuk *Volksraad* itu yaitu pada bulan Mei 1918 kedudukan *Volksraad* itu bukanlah sebagai 'Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya. Kedudukan itu adalah sebagai penasihat Gubernur Jenderal. Pada bulan Nopember 1918 Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum mengemukakan janji di depan *Volksraad* yang terkenal dengan janji Bulan Nopember atau November Belofte yang intinya menjanjikan suatu haluan baru bagi pemerintahan Kolonial di Indonesia sebagai akibat logis dari perkembangan zaman.

Pada tahun 1925 ditetapkanlah *Indische Staatsregeling* dengan hak-hak yang diberikan kepada *Volksraad* untuk mengemukakan amandemen mengenai ordonansi-ordonansi dan anggaran belanja. Pada tahun 1931 barulah berlaku apa yang disebut *"Inlandse Meerderheid"* yang mengatur jumlah anggota-anggota *Volksraad,* yaitu tiga puluh dari anggota Indonesia, dua puluh lima dari anggota berbangsa Belanda, dan lima orang dari Timur Asia. Dari perimbangan seperti itu, maka orang-orang Indonesia diwakili dalam *Volksraad* satu untuk dua seper tiga juta, orang-orang Belanda diwakili satu untuk delapan ribu. Cara memilih anggota *Volksraad* itu adalah melalui Dewan Kabupaten, Dewan Kota, Dewan Propinsi, dan sebagainya. Sebanyak dua puluh dua anggota diangkat dan tiga puluh delapan dipilih melalui cara yang disebut di atas.

Selama masa Volksraad yang berumur dua puluh empat tahun itu, yaitu tahun 1918-1942 bagi daerah Sumatra Utara hampir secara langsung tidak ada pengaruhnya. Hal itu disebabkan oleh karena pemerintahan umum di Sumatra Utara menurut sistem kolonial barulah diatur pada permulaan abad XX. Berbeda dengan di Jawa yang pemerintahannya telah diatur sejak abad XIX, yaitu sejak Daendels, kemudian Raffles, kemudian Raffles dan dilanjutkan oleh Gubernur-gubernur Jenderal yang lain. Maka pemerintahan Kolonial di Sumatra Utara itu usianya hampir sejalan dengan usia *Volksraad* itu sendiri.

Penyempurnaan sistem pemerintahan itu barulah dalam taraf pembinaan yaitu jika kita perhatikan tentang pertumbuhan *raad-raad* di daerah ini, nyatalah bahwa di kota Medan sajalah pemerintahan kota yang didampingi oleh *Gemeente Raad,* yang dibentuk sejak tahun 1919. Pembagian golongan didasarkan kepada golongan-golongan dan sebagian besar *raad* itu diisi oleh golongan

Belanda. Beberapa orang wakil pribumi dalam *Gemeente Raad* di Medan tahun 1919 itu ialah Mohammad Noech, Amaluddin, Ismail, dan Sutan Ibrahim. Pada tahun 1928 anggota-anggota *Gemeente Raad* itu ialah tujuh belas orang dengan perincian sepuluh wakil Belanda, lima wakil Indonesia, dan dua Timur Asing. Anggota-anggota Indonesia yang duduk ialah Abdullah Lubis, Arsyad Gelar Datuk Sinarokayo, Moehammad Arief, M. Nurngali, dan R. Pirngadi.

Pada daerah-daerah atau kota yang lain seperti Pematang Siantar diperintahi oleh *Fungerend Burgermeester* (Pejabat Wali Kota) yang dirangkap oleh Asisten Residen. Dewan-Dewan atau *Raad* dibentuk oleh pemerintah Belanda menurut kebutuhan politiknya. Di daerah Sumatra Timur diadakan satu Dewan yang disebut *Cultuur Raad* yang diketuai oleh Residen Sumatra Timur. Di daerah-daerah lain seperti Sipirok dan Angkola diadakan *Locale Raad* yang diketuai oleh *Controleur* Angkola en Sipirok selaku pejabat tertinggi pemerintahan di daerah tersebut. Di kota-kota Binjai, Tanjung Balai, dan Tebing Tinggi pemerintahan disebut *Gemeente* diketuai oleh pejabat yang tertinggi di daerah itu yang disebut *Voorzitter.* Barulah pada tahun 1938 pada tiap beberapa negeri dibentuk suatu Dewan yang disebut *Inlandsche Gemeente Raad* yang diketuai oleh Kepala-Kepala Negeri. Anggota-anggotanya terdiri dari Kepala-Kepala Kampung di daerah tersebut. Demikianlah susunan *raad* yang ada di daerah Sumatra Utara sampai Perang Dunia II (1942).

Sebagaimana dikatakan di atas, maka anggota-anggota *Volksraad* itu diutus oleh pilihan *Raad-raad* yang ada di daerah.

Demikianlah utusan-utusan itu sebagian besar adalah utusan pilihan yang jatuh ke tangan bangsa Barat (Belanda) justru di dalam *raad* itu mereka menduduki jumlah yang terbesar.

Beberapa orang yang pernah menduduki jabatan anggota Volksraad yang berasal dari Sumatra Utara dari Pribumi ialah: Abdul Rasyid seorang dokter partikulir yang berasal dari Padang Sidempuan. Pada masa itu ada pula daerah-daerah di Sumatra Utara mengirim utusan orang berkulit putih, menjadi anggota *Volksraad.* Beberapa orang lain yang pernah menjadi anggota Volksraad ialah Teungku Mahmud yang di Medan terkenal dengan usahanya sebagai penasihat Perguruan Ivorno.

Ada beberapa orang lain yang berasal dari Sumatra Utara yang menjadi anggota *Volksraad,* yaitu Mangaraja Suangkupon,

atau Firman Gelar Mangaraja Suangkupon, yang sebenarnya mewakili *Indonesia Nationalistische Groep*. Anggota lain yaitu Mr. Dr. Todung Gelar Sutan Gunung Mulia. Beliau adalah Pegawai Tinggi pada Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan. Beliau sebenarnya dari *Christelijke Staatkundige Partij*. Seorang Anggota Volksraad yang lain ialah Dr. Musa seorang dokter khewan yang berasal dari Pematang Siantar.

Setelah berdirinya *Volksraad* sedikit sekali peranannya dalam pemerintahan, sehingga mendapat nama yang kurang baik dalam masyarakat dan sering disebut komidi omong. Walaupun demikian segala gerak dalam *Volksraad* itu tidak luput dari perhatian rakyat. Demikianlah ketika Petisi Sutarjo pada tahun 1937 yang menuntut dominion status dan Indonesia Berparlemen dan Abikusno yang meminta agar rakyat dipersenjatai ternyata sangat diperhatikan oleh penduduk di daerah ini.

Sesudah tahun 1938 sesuai dengan hasil perluasan-perluasan *locale raad* terjadi beberapa ibukota *afdeeling* seperti Pematang Siantar, Sibolga, Padang Sidempuan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem desentralisasi yang ditentang oleh kaum nasionalis.

E. PERJUANGAN DI DAERAH

1. Interaksi dengan pemogokan-pemogokan di sekitar tahun 1923

Perubahan yang penting pada permulaan abad XX di tengah masyarakat Sumatra Utara sebagai akibat masuknya modal asing membawa bentuk kepada salah satu lapisan masyarakat pekerja atau buruh. Lapisan ini makin lama makin nyata dan di Sumatra Utara kaum buruh yang muncul sejak akhir abad XIX itu dapat kita bagi dua kategori.

Pertama, golongan yang kita sebut kuli kontrak. Mereka adalah kuli kebun yang hidupnya terikat sangat ketat dengan peraturan-peraturan yang termuat dalam *koeli-ordonantie*. Untuk jelasnya pengaruh (impact) dari kuli ordonantie itu bagi kehidupan buruh, bahwa kuli-kuli tersebut sebenarnya adalah pekerja yang setiap kali memperpanjang kontraknya. Setiap kontrak memakan waktu tertentu yaitu setahun atau dua tahun. Selama kontrak mereka di tempatkan di bawah pengawasan seorang anemer yang di-

awasi oleh centeng. Jika ada di antara kuli itu yang melalaikan tugas maka sesuai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani dalam kontrak, mereka dapat ditangkap oleh opas kebun. Mandur-mandur bertindak juga sebagai pengawas mereka dan dapat menangkap serta memberi hukuman. Dengan demikian dalam masyarakat kuli kebun terdapat lapisan-lapisan kuli yang terdiri dari kuli tanam, kuli cangkul, kuli gudang, kuli lepas di bawah pimpinan anemer, dan diawasi oleh mandur. Mandur mengawasi kerja, dan di samping itu ada opas-opas yang lebih terkenal dengan centeng.

Hampir semua pekerja lapisan paling bawah yaitu kuli-kuli dipisahkan sedemikian rupa sehingga masing-masing terikat dan sangat patuh kepada mandur-mandur. Mandur satu, mandur Kepala, kerani adalah jabatan yang dapat dipegang oleh kaum pribumi dan masing-masing lapisan mereka dipisahkan sedemikian rupa sehingga mandur merasa dirinya lebih tinggi dari kuli, seterusnya kerani lebih tinggi dari mandur. Status ini bukan saja berlaku dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka kesatuan kaum buruh kebun atau yang terkenal dengan kuli kontrak itu tidak mungkin kita temukan. Justru masing-masing lapisan merasa dirinya tidak senasib. Ada juga orang-orang lapisan yang tinggi jabatannya menginginkan perubahan nasib kuli kasar, tetapi tidak mungkin dilakukan melalui organisasi. Kegiatan organisasi itu dilarang dengan keras di perkebunan. Jalan yang mungkin mereka tempuh, jika mereka hendak memperjuangkan perubahan nasib buruh ialah melalui tulisan pada surat-kabar. Demikianlah misalnya Tan Malaka yang pernah bertugas sebagai guru di Sekolah Perkebunan Tanjung Morawa menulis dalam surat-kabar *Sumatra Post* dengan nama samaran Poncodrio. Dalam tulisan itu membela nasib kaum buruh, tetapi tulisan-tulisan seperti itu dan banyak lagi yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin lain tidak ada artinya bagi perubahan nasib kuli.

Buruh-buruh perusahaan lain seperti buruh *Deli Spoor Maatschappij* (DSM) kelihatannya jauh lebih maju. Mereka tidak bekerja sebagai kuli kontrak. Lagi pula jenis pekerjaan yang mereka lakukan menghendaki tenaga-tenaga kuli yang telah pandai tulis baca dan lebih terdidik. Oleh sebab itu di kalangan kaum buruh kereta-api inilah gerakan kaum buruh itu lebih tampak.

Di kalangan buruh kereta-api itu berpengaruh paham sosial demokrat, lebih-lebih setelah berdirinya ISDV di Jawa pada tahun

1914 dan ketika ISDV itu dapat mempengaruhi Sarekat Islam *afdeeling* Semarang di bawah pimpinan Semaun dan Dharsono pada tahun 1917.

Di Medan sejak itu berdirilah Serikat Sekerja DSM dan pada tahun 1919 di bawah pimpinan Muhammad Samin dan Crediet, Serikat Sekerja ini melakukan pemogokan. Pemogokan itu bertujuan untuk meminta kenaikan upah, tetapi tidak berhasil. Dalam pemogokan itu pihak maskapai DSM tidak memberi konsesi apa-apa kepada kaum buruhnya, walaupun Gubernur berusaha menjadi penengah. Malahan Gubernur Jenderal dari Batavia memberi saran kepada pihak DSM agar tuntutan kaum buruh itu diperhatikan. Nyata sekali dalam masa itu, bahwa kedudukan maskapai jauh lebih kuat dari kedudukan pemerintah, karena akhirnya pihak maskapai tidak bersedia memenuhi saran Gubernur Jenderal itu. Dalam hal ini rupanya maskapai takut, jika pemogokan itu berhasil memenuhi kehendak kaum buruh, maka pemogokan itu dapat meluas ke perkebunan.

Walaupun DSM itu bukan milik perkebunan, tetapi saham-saham DSM itu sebagian besar berada pada maskapai perkebunan. Direktur DSM itu ialah J.Th. Cremer yang terkenal sebagai raja tanpa mahkota, sebab peranannya besar dalam maskapai perkebunan.

Pada masa pemogokan buruh kereta-api di Medan tahun 1919 itu ternyata orang-orang Belanda mengambil oper segala pekerjaan buruh Indonesia. Mereka mengerjakan pekerjaan sebagai masinis, menjadi pengatur loko, malahan mengerjakan segala pekerjaan kasar lainnya. Oleh karena kelihatannya usaha pemogokan itu tidak berhasil, kemudian kaum buruh kembali ke pekerjaannya.

Jika kita lihat interaksi dengan pemogokan-pemogokan di Jawa yang dilakukan sekitar tahun 1923, di mana organisasi PKI mengambil peranan di dalamnya dan mengakibatkan Semaun diusir dari Indonesia, maka Medan telah lebih dulu berpengalaman dalam soal pemogokan itu. Pemimpin-pemimpin buruh di sini tidak tertarik lagi dengan usaha seperti itu, justru paham komunis juga ditakuti oleh masyarakat dan tidak berurat pada kepercayaan. Lebih-lebih lagi pihak Kolonial pada masa itu telah memperketat pengawasannya melalui PID *(Politieke Inlichtingen Dienst)* berusaha mematikan setiap gerakan perjuangan di daerah ini. Daerah Sumatra Utara yang sangat penting kedudukannya da-

lam perekonomian Kolonial tentu saja perlu diawasi mereka dengan ketat sekali. Dalam hal seperti itulah di daerah ini pemogokan-pemogokan yang berlangsung di Jawa sekitar tahun 1923 tidak mempengaruhi kehidupan perburuhan di Sumatra Utara. Tetapi sebaliknya dapat juga dikatakan, bahwa di Medan aksi pemogokan itu telah lebih dulu berlangsung mendahului di Jawa yaitu pada tahun 1919.

Selanjutnya dapat kita lihat, bahwa ada dua pola pemogokan kaum buruh itu, yaitu pemogokan yang dipelopori oleh Serikat Islam yaitu sebelum tahun 1921, pada dasarnya adalah bermotifkan perbaikan sosial kaum buruh. Tetapi di samping itu di dalam Serikat Sekerja yang sejak tahun 1919 itu di Indonesia tergabung dalam PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) telah masuk pengaruh Komunis yang dipimpin oleh Semaun yang bermaksud menjadikan pemogokan itu sebagai senjata politik. Demikianlah pemogokan sekitar tahun 1923 yang terjadi di beberapa tempat di Jawa seperti Pegawai Pegadaian 1922, pemogokan buruh kereta-api 1923, dan seterusnya adalah pemogokan yang dipengaruhi oleh kaum komunis. Golongan Serikat Islam tidak berada di dalamnya dan demikianlah keadaan di Medan dan di Sumatra Utara, aksi-aksi pemogokan yang terjadi di Jawa itu tidak diikuti justru karena pengaruh komunis itu belum masuk ke dalam kehidupan buruh di daerah ini.

2. Interaksi Dengan Pemberontakan Tahun 1926-1927

Sepintas lalu pemberontakan yang berlangsung di beberapa tempat di Indonesia pada tahun 1926-1927 sering disebut sebagai pemberontakan komunis. Jika kita tidak teliti memahamkannya mungkin salah mengerti, dan menganggap bahwa yang memberontak terhadap Belanda pada waktu itu seluruhnya adalah komunis.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih baik, perlu kita kemukakan hubungan antara Partai Komunis Indonesia dengan Komunis Internasional. Sejak tahun 1924 Komunis Internasional tidak hanya menyokong pergerakan-pergerakan kebangsaan rakyat-rakyat terjajah. Dengan dasar itulah, maka dalam Kongres Partai Komunis Indonesia di Kota Gede tahun 1924 diputuskan untuk membentuk sel-sel yang mengadakan gabungan lima sampai sepuluh orang. Anggotanya dididik menjadi pemimpin gabungan-gabungan baru yang lebih luas. Dengan demikian setiap sel diharuskan berkembang.

Demikianlah jika kita memahamkan bahwa komunis itu berbeda dengan agama malahan bertentangan, tetapi dengan sistem-sistem yang dipakai oleh komunis tadi, maka mereka menyesuaikan propagandanya dengan kondisi di Indonesia yang rakyat kebanyakan buta huruf dan taat beragama. Oleh sebab itu pulalah, pemberontakan yang terjadi pada minggu terakhir tahun 1926 dan minggu pertama tahun 1927 yang terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Barat jelas mula-mula dipelopori oleh golongan Komunis. Tetapi orang-orang yang dilibatkan ke dalam pemberontakan itu tidak paham akan ideologi komunis itu sendiri, malahan banyak di antara mereka yang sebenarnya tergolong fanatik agama, berpaham nasionalis, malahan ada juga orang-orang yang tidak jelas identitasnya, tetapi memiliki semangat pemberontakan.

Pada umumnya di Indonesia pada tahun 1926-1927 itu terjadi aneka-ragam kegentingan dan pertentangan yang selama ini tersembunyi dalam tiap-tiap negeri jajahan. Yang terjadi sebenarnya tidak banyak. Di Jakarta dan sekitarnya hanya berlangsung pembunuhan seorang agen polisi dan pendudukan Kantor Telegram, sebentar saja pada malam 12 Nopember 1926. Yang lebih hebat ialah di Banten, pada malam itu juga seorang Wedana dan pegawai rendahan beserta keluarganya dibunuh. Jembatan, jalan kereta-api, kawat telpon dirusak. Di Priangan terjadi juga demikian, tetapi kecil-kecilan saja. Pada bulan Januari 1927 terjadi pula huru-hara di Sumatra Barat yaitu di daerah Silungkang yang diorganisasi oleh Serikat Jin yang bergerak di bawah tanah.

Bagi daerah Sumatra Utara, pada umumnya telah banyak pemimpin organisasi sekitar tahun 1926-1927 itu. Sekurang-kurangnya telah banyak pula orang yang menjadi simpatisan organisasi itu. Para anggota organisasi itu selalu menceritakan tentang tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Tan Malaka dan lain-lain.

Sesuai dengan perkembangan pergerakan pada waktu itu, maka kegiatan pemberontakan baik yang terjadi di Jawa Barat maupun di Sumatra Barat ternyata telah dikoordinasi oleh kekuatan komunis. Tetapi koordinasi yang mereka lakukan melalui sel-sel yang dianggap telah berfungsi di daerah-daerah lain ternyata belum siap untuk tindakan serentak. Rahasia komunis cepat diketahui Belanda. Jika Partai Komunis itu melakukan infiltrasi ke dalam kelompok-kelompok lain, sebaliknya ke dalam diri mereka juga PID melakukan infiltrasi. Banyak anggota yang dianggap telah

matang, ternyata adalah orang-orang PID.

Demikianlah di Sumatra Utara pada sekitar tahun 1926-1927 itu ternyata tidak ada suatu aksi yang besar seperti yang terjadi di Jawa Barat atau Sumatra Barat. Namun demikian, menyadari pengaruh komunis yang telah meluas ke dalam diri penduduk, terutama penduduk desa (petani), pedagang dan buruh, maka Belanda melakukan penangkapan besar-besaran. Melalui hak-hak luar biasa Gubernur Jenderal, yaitu *Exorbitante rechten* pasal 161, maka Gubernur Jenderal berhak melakukan *externering,* artinya mengusir dari daerah Hindia-Belanda; *internering* artinya menempatkan pada satu tempat sebagai daerah penampungan yaitu melarang seseorang berdiam di satu tempat. Demikianlah dalam masa tahun 1926-1927 itu sebagaimana di daerah lain di Indonesia, maka banyak orang yang ditangkap dan diinternir ke Digul atau ada pula yang ditangkap dengan dalih penjahat lalu dihukum mati. Para Digulis itu di antaranya dari Sumatra Utara ialah M. Joni, Xarim Ms, dan M. Saleh Umar. Sebenarnya banyak lagi orang yang dibuang ke Digul dan jumlah seluruhnya dari Indonesia sekitar tiga belas ribu orang.

Penduduk di Sumatra Utara sebagaimana juga penduduk di daerah lain di Indonesia tidak menyadari aliran-aliran politik, tetapi masyarakat sangat tertarik kepada semua keperwiraan, kepahlawanan dan menaruh hormat kepada semua kekuatan yang berani secara terang-terangan menentang kekuasaan Kolonial.

3. Sikap Masyarakat Terhadap Azas Non-Kooperasi Dan Kooperasi Terhadap Pemerintah Hindia-Belanda

Sebagaimana umumnya gerakan kebangsaan pada bangsa-bangsa terjajah, kita mengenal sikap *Co* dan *Non-Cooperatie* terhadap pemerintah Kolonial. Agar jangan salah mengerti, terlebih dahulu hendaklah ditegaskan bahwa kedua sikap ini ada persamaan dasar dan tujuan. Dasarnya adalah kebangsaan dan tujuannya adalah kemerdekaan, tetapi metode perjuangannya berbeda. Golongan Co sebagai yang dipelopori oleh Natosuroto pemimpin *Indische Vereniging* sebelum Hatta sampai di Nederland memakai metode *assosiatie van Oost en West,* sedangkan pemimpin *Indische Vareniging* yang lain menganut paham Non-Kooperasi dengan pengertian *"National Progressief"* yang menuntut atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari Negeri Belanda.

Di Sumatra Utara, jika kita membicarakan sikap masyarakatnya tentu terlebih dahulu kita bagi-bagi menurut lapisannya. Lapisan terbesar adalah lapisan tidak sadar politik. Mereka adalah golongan rakyat jelata, petani miskin, kuli kebun, nelayan miskin. Mereka ini adalah golongan yang apatis. Mereka takut dan menganggap soal-soal politik atau pemerintahan itu tidak termasuk urusan mereka, sebab turun-temurun mereka itu adalah golongan yang selalu diperintahi. Belum pernah mereka mengenal hak, selalu mengenal kewajiban belaka.

Golongan kedua yaitu golongan orang-orang yang secara turun-temurun secara tradisional memerintah. Mereka adalah golongan bangsawan, dan di Sumatra Timur mereka ditandai dengan sebutan Sultan, Pangeran, Raja, Sibayak, Partuanan, dan sebagainya. Di Tapanuli mereka itu adalah Kepala-Kepala Negeri, Demang, Kepala Kuria atau tehounori di Nias. Golongan kedua ini pada umumnya adalah golongan yang mengagumi kebesaran Belanda, ketinggian martabat kulit putih dan sedikit pun tidak terlintas dalam pikiran mereka untuk menuntut lepas dari kekuasaan Belanda.

Golongan ketiga adalah golongan petani maju, pedagang, golongan intelek, golongan pemimpin agama dan di kalangan inilah kita kenal kebanyakan lahirnya para pemimpin pergerakan. Mereka inilah yang mempunyai sikap tertentu, punya kesadaran politik, punya dasar kebangsaan yang sadar dan dalam pandangan perjuangan, mereka itu tergolong kepada *Co* dan *Non* kooperasi, sejak berdirinya organisasi-organisasi politik di daerah ini seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan organisasi lain, maka kelihatannya golongan Budi Utomo sampai kepada Parindra kelak menganut paham kooperasi. Pemimpin-pemimpin yang terpengaruh paham komunis bersikap Non-Kooperasi. Tetapi di kalangan mereka ini telah ditekan dengan pembuangan ke Digul atau ke tempat lain dalam peristiwa 1926-1927 melalui Gubernur Jenderal yang disebut *exorbitante rechten* pasal 161 Hak itu memberi kekuasaan kepada Gubernur Jenderal membuang ke luar, ke daerah lain pemimpin-pemimpin yang dianggap membahayakan keamanan negara.

Salah satu cara untuk menilai sikap masyarakat terhadap Non dan Co itu ialah melalui mass-media yaitu surat-surat kabar seperti *Pewarta Deli, Pelita Andalas, Sinar Deli* selalu mengemukakan kritik yang pedas terhadap kaum kolonial baik kepada pemerintah

maupun kepada penguasa *(onder nemers).* Ada motto para wartawan di masa kolonial, yaitu mereka itu semuanya menginginkan promosi sebagai wartawan yang baik melalui proses pengadilan terhadap tulisan-tulisan mereka. Wartawan yang tidak pernah dituntut di meja hijau belum tergolong sebagai wartawan yang baik. Sebaliknya ada juga surat-surat kabar yang menyuarakan kepentingan kaum kolonial seperti *Deli Courant, Dagblad Nieuw China, De Sumatra Post,* dan *Bin Poh* yang sifat tulisan-tulisannya membela kepentingan kaum kolonial.

Wartawan-wartawan seperti Jaendar Muda, M.H. Manullang, Alexander Sutan Sumurung, Kasoema, Amarullah O. Lubis, Djamaluddin Adinegoro, Parada Harahap, T. Jafizham, Hasbullah Parinduri, Hasan Noelarifin, Boerhanoeddin Diah, adalah wartawan-wartawan yang terkenal dengan tulisannya yang tajam memberikan kritik kepada kaum kolonial serta alat-alat kekuasaannya. Akhirnya dapat kita sebutkan beberapa wartawan yang pada zaman kolonial telah berani mengutarakan pendapatnya dan memimpin masyarakat melalui tulisan-tulisannya. Mereka itu ialah Sutan Parlindungan, Mangaraja Salabae, R.K. Mangunatmojo, Muhammad Joenoes memimpin *Benih Merdeka* bersama dengan Muhammad Samin; Raja Sabaruddin adalah orang yang memodali Benih Merdeka itu.

Selain dari surat-surat kabar perlu juga dikemukakan beberapa pemimpin majalah yang menyuarakan sikap perjuangan seperti M. Azhari redaktur *Al athfal;* H. Abdul Halim Hassan, Zainal Arifin Abbas, dan A.R. Haitami yang memimpin *Al Quranul Kariem;* Moehammad Jamil Iman yang memimpin *Bintang Islam;* M. Arsyad Thalib, Lubi, yang memimpin *Dewan Islam;* H. Abdul Kadir yang memimpin *Medan Islam;* Z.A. Ahmad yang memimpin *Panji Islam;* Abdul Karim Ms. yang memimpin *Penyebar,* Abdurrahman Syiha yang memimpin Taman Pelajar, Moechtar, Yoesoep Sobarang memimpin *cahaya Islam.* Pada umumnya mereka itu dalam sikapnya adalah non-kooperasi, dalam arti sikap mereka memberikan bimbingan kepada sidang pembacanya agar berkesadaran nasional untuk menentang penjajahan.

4. Interaksi Dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Oleh kaum Nasionalis terpelajar yang terdapat dalam *studie club* yang berasaskan persatuan Indonesia, sejak semula dicari ja-

lan memperoleh persatuan. Pada bulan Agustus 1926 untuk mempelajari hal ini didirikan di Bandung *Indonesische Eenheidscommite* atau Komite Persatuan Indonesia dan di Surabaya telah didirikan pula Komite Persatuan Kebangsaan yang menjelma menjadi Komite Persatuan Indonesia. Di dalamnya duduk *Studie Club*. SI, Muhammadiyah, JIB, Pasundan, Persatuan Minahasa, Serikat Ambon, dan Sarekat Madura, yang mengusahakan persatuan bagi persatuan bangsa.

Pada tahun 1927 lahirlah PNI yang dipelopori oleh kaum terpelajar yang tamat dari Negeri Belanda dan kaum terpelajar yang dididik di Indonesia. PNI berjuang terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi inilah yang berhasil membina persatuan di kalangan organisasi-organisasi di Indonesia yang berhaluan nasional dengan sebutan PPPKI tanggal 17 Desember 1927. Gabungan ini berusaha mencapai kesatuan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi dengan bekerjasama antara anggota-anggotanya. Gabungan ini menghindarkan hal-hal yang berbeda-beda dan mencoba mencari persamaan di antaranya. Kemudian dibentuk suatu majelis pertimbangan yang terdiri dari wakil-wakil partai yang tergabung itu.

Tidak banyak hasil yang dicapai oleh PPPKI karena walaupun dalam Kongres di Surabaya telah digariskan (1928) jalan-jalan untuk menjaga persatuan, yaitu agar tidak mempersoalkan perbedaan asas, perbedaan non dan co, namun terasalah bahwa di dalam PPPKI itu ada perbedaan, terutama kekhawatiran organisasi lain terhadap dominasi PNI.

Di Sumatra Utara Partai Nasional Indonesia telah mendirikan cabang-cabangnya di beberapa kota seperti Medan, Pematang Siantar, dan lain-lain. Tokoh-tokoh PNI itu adalah tergolong kaum intelek dan beraliran revolusioner. Sebagai organisasi yang baru muncul pengaruhnya tidak banyak, lebih-lebih pada tahun-tahun itu kekuatan kolonial sedang berusaha membersihkan daerah ini dari unsur-unsur komunis dan oknum-oknum yang menentang pemerintah Belanda.

Dengan mempergunakan PPPKI yang berada di Jawa, maka organisasi-organisasi di daerah ini dapat dipergunakan oleh kaum Nasionalis di daerah ini untuk mengemukakan ide-ide mereka. Oleh sebab itu masyarakat di Sumatra Utara, kadang-kadang tidak mengerti dari mana asal seorang pemimpin itu, justru mereka melihat agitator-agitator itu sering bukan dari golongan mereka

sendiri, tetapi figur mereka itu sangat dikagumi. Demikianlah misalnya Saleh Umar, A.M. Joni tidak dikenal sebagai pimpinan PNI tetapi dikenal sebagai pemimpin saja dengan mempergunakan PPPKI sebagai wadah untuk berbicara kepada rakyat.

Lama-kelamaan setelah SI keluar dari PPPKI pada tahun 1930 dan PNI pun dibubarkan pada tahun itu juga, maka dengan sendirinya PPPKI itu tidak berarti lagi fungsinya di tengah masyarakat. Maka dengan demikian, walaupun PPPKI itu usianya tidak lama namun dapat dijadikan alat untuk mempersatukan golongan-golongan di tengah masyarakat, menggembleng jiwa persatuan, mengesahkan lagu kebangsaan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan dan mengesahkan Merah Putih sebagai bendera kebangsaan.

5. Interaksi Dengan Sumpah Pemuda

Gerakan-gerakan Pemuda yang bermula dengan Tri Koro Dharmo yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 diikuti oleh organisasi-organisasi lain seperti *Jong Sumatranen Bond* pada tahun 1917. Pada tahun 1918 Tri Koro Dharmo berubah menjadi *Jong Java* dan setelah itu berdirilah organisasi-organisasi pemuda lainnya seperti *Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon,* Sekar Rukun, dan Pemuda Kaum Betawi. Suatu organisasi pemuda yang bersifat keagamaan yang merupakan pecahan *Jong Java* ialah *Jong Islamieten Bond* berdiri pula pada tahun 1924.

Di antara organisasi-organisasi pemuda itu selalu dicari usaha untuk mempersatukan diri, terutama akibat pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia itu mulanya adalah *Indische Vereniging* yang berdiri pada tahun 1908, kemudian pada tahun 1922 berubah menjadi *Indonesische Vereniging.*

Kongres Pemuda tahun 1926 tidak berhasil menemukan persatuan, tetapi kemudian berdirilah PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). Akhirnya pada tahun 1928 berlangsunglah Kongres Pemuda II yang diikuti oleh *Jong Java, Jong Sumatra* (Pemoeda Soematera), pemuda Indonesia, Sekar Roekoen, *Jong Islamieten Bond, Jong Celebes,* Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. Kongres tersebut berhasil mengambil putusan berupa Sumpah Pemuda yang berisi:

Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah

darah yang satu, Tanah Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Pada umumnya organisasi-organisasi pemuda itu terdapat di Jawa, tetapi di daerah Sumatra Utara berdiri pula organisasi yang merupakan bagian dari organisasi partai seperti Tri Koro Dharmo di bawah pimpinan Dasuki, kemudian berubah menjadi *Jong Java.* Organisasi *Jong Sumatranen Bond* tidak ada di Sumatra Utara, tetapi hanya ada di Jawa dan Sumatra Barat. Begitu pula *Jong Batak* itu pun hanya ada di Jawa. Setelah itu berdiri pula *Jong Islamieten Bond* dengan organisasi kepanduannya Hizbul Wathan. Kemudian setelah berlangsung Kongres Pemuda dan setelah tercetus Sumpah Pemuda maka berdirilah di Medan Indonesia Muda dengan organisasi kepanduannya Inpo.

Di samping itu ada juga organisasi-organisasi lain, dan organisasi-organisasi lain itu tidak semua dilebur ke dalam Indonesia Muda.

Pada masa sekitar tahun tiga puluhan pemuda-pemuda Indonesia di Medan, Pematang Siantar, dan kota-kota lain umumnya pelajar-pelajar Bumiputra selalu merasa bersaingan dengan pemuda-pemuda pelajar dari Sekolah-sekolah Belanda dan Sekolah Cina. Mereka masing-masing memajukan kegiatan dalam bentuk olah raga dan tiap-tiap organisasi mempunyai kebanggaan dan kebanggaan itu mempunyai latar-belakang kebangsaan.

Berbeda dengan organisasi-organisasi yang terdapat di Jawa, maka organisasi-organisasi pemuda yang terdapat di Sumatra Utara itu kurang berafilisasi kepada daerah masing-masing. Yang kelihatan ialah segi kebangsaan dan keagamaan masing-masing.

6. Kegiatan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kehidupan

Apabila kita pandang masyarakat Sumatra Utara sekitar tahun dua puluhan, maka kelihatan berbagai kegiatan baru di samping kegiatan tradisional, yang masih tetap hidup di desa-desa.

Di bidang ekonomi, pada beberapa tempat masyarakat desa telah menanam bermacam tumbuhan budaya *(Cultuurgewassen)* seperti karet, kopi, yang banyak ditanam oleh penduduk di Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan. Kopi adalah hasil penduduk Dairi, sedang di Tanah Karo terkenal dengan sayur-sayuran, ken-

tang, bunga serta buah-buahan. Kemudian kegiatan ekonomi baru sebagai akibat dari kemajuan pasar (ekonomi uang), maka perdagangan antar daerah semakin maju, pasar-pasar yang memperdagangkan hasil pertanian penduduk biasanya terdapat di tiap-tiap daerah. Pasar yang paling kecil disebut *pekan (onan, pajak, tiga).* Kemudian antar pekan dengan kota dihubungkan dengan pedati, sado, kuda beban, atau ada juga dengan mobil. Demikianlah kota-kota seperti Kabanjahe, Tarutung, Siborong-borong sebenarnya mempunyai latar belakang daerah pertanian. Pemakaian uang semakin luas, ada dikenal bank desa, pajak gadai, yang merupakan tempat peminjaman uang untuk penduduk yang memerlukan.

Dalam lapangan sosial, sehubungan dengan kemajuan tadi dan juga kemajuan transportasi, maka terjadilah pertemuan berbagai penduduk daerah atau suku-suku. Pertemuan itu mengubah pandangan lama yang tertutup menjadi semakin terbuka. Hendaklah diingat, bahwa masa ini adalah masa peralihan, sehingga masing-masing suku masih menonjolkan ketinggian kebudayaan masing-masing dan kiranya hal itu telah dimanfaatkan oleh kaum kolonial untuk memperuncing perselisihan antar suku, menghalangi persatuan. Persatuan antara daerah telah semakin banyak. Tetapi motif persatuan itu ada dua macam. Pertama, untuk memperoleh tanah pertanian yang baru, seperti perantauan orang-orang Batak ke Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Deli, Serdang, atau orang-orang Karo ke Langkat, Deli. Tetapi motif lain adalah urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Pandangan, bahwa orang kota itu lebih tinggi martabatnya menyebabkan banyak orang tertarik untuk hidup di kota.

Dalam bidang pendidikan, setelah dibuka sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah desa, dan sekolah sambungan *(Volkschool* dan *Vervolgschool),* maka terdapat keinginan yang sangat besar bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan itu. Namun pada sebagian penduduk masih ada yang tidak menyukai pendidikan Barat, yang mereka anggap bertentangan dengan kebiasaan, lebih-lebih bagi anak perempuan.

Umumnya tiap sekolah desa yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas satu, dua, dan tiga itu diajar oleh seorang guru. Kedudukan guru sangat tinggi dan sangat terhormat di mata penduduk.

Sampai tahun 1928 di kota-kota telah banyak HIS yaitu *Hollandsch Inlandsche School.* Sekolah ini memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Anak-anak yang masuk HIS itu ada-

lah anak orang terkemuka, baik karena keturunannya maupun kekayaannya.

Kehidupan orang Belanda yang merupakan minoritas di tengah penduduk dianggap lebih unggul. Mereka telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bahasa Belanda dianggap lebih penting, dan dijadikan ukuran bagi ketinggian kedudukan seseorang. Sebaliknya di kalangan orang-orang tua telah timbul rasa curiga terhadap kebudayaan Barat itu. Hal itu lebih-lebih setelah melihat terpisahnya pemuda-pemuda yang telah menerima pendidikan Barat dari kehidupan sosial keluarga mereka.

Perubahan dalam agama di Sumatra Utara, dapat kita lihat dari segi perluasan penyiaran agama dan bentuk-bentuk organisasi serta bentuk pendidikan agama. Penyiaran agama Kristen tetap melalui Missi dan penyiaran agama Islam sejak abad XX ini melalui berbagai organisasi yang mulai tumbuh. Pada masa ini bukan hanya Kristen Protestan yang berkembang di daerah ini, tetapi juga agama Katholik.

Pendidikan agama Islam mengalami perubahan penting dengan berdirinya madrasah-madrasah. Perbedaan madrasah dengan sistem lama ialah karena madrasah itu memakai kelas-kelas dengan kurikulum dan mengenal kenaikan kelas serta memberikan ijazah. Tingkat-tingkat madrasah itu ialah *Ibtidaiah, Tsanawiyah,* dan *Aliah,* yang sama dengan tingkat dasar, menengah, dan tinggi.

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN ± 1930

1. Politik Keras Terhadap Gerakan Non Kooperasi

Pergerakan Kebangsaan Indonesia sekitar tahun 1930 menunjukkan sikap non-kooperasi yang semakin tegas. Partai Nasional Indonesia menempuh jalan perjuangan dengan memakai tenaga massa untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara itu PPPKI telah terbentuk dan para pemuda telah mencetuskan Sumpah Pemuda yang keduanya merupakan alat perjuangan untuk menggalang persatuan bangsa Indonesia.

Jika pemberontakan sekitar tahun 1926 – 1927 dengan mudah dapat dipadamkan oleh kekuatan militer Belanda, justru perlawanan tahun 1926 – 1927 itu memakai metode kekuatan pisik, mudah terlihat dan dituntut karena pembunuhan dan perusakan yang dilakukan pada waktu itu. Menghadapi gerakan non-kooperasi yang tidak menempuh kekuatan pisik dan tidak dengan kekerasan sekitar 1930 ini, pemerintah kolonial semakin sulit. Jalan yang ditempuh oleh Gubernur Jenderal ACD de Graeff untuk membuang para pemberontak ke Digul pada tahun 1926 tidak mudah dipakai untuk mematahkan aksi-aksi massa yang dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia.

Sementara itu Gubernur Jenderal ACD de Graeff, kemudian Gubernur Jenderal BC de Jonge mempergunakan hak-hak istimewa yang ada pada Gubernur Jenderal untuk mengasingkan para pemimpin Partai Nasional Indonesia. Demikianlah setelah para pemimpin Partai Nasional Indonesia ditangkapi, pemerintah Belanda melakukan razia. Rumah-rumah guru Taman Siswa di Medan, kantor-kantor redaksi surat kabar digeledah dengan tuduhan melakukan kegiatan gelap. Banyak pemimpin ditangkapi dan dengan penangkapan itu pemerintah Belanda berharap agar para pemimpin itu menjadi takut dan mengubah sikap.

Oleh karena gerakan non kooperasi itu tidak hanya dikenal oleh Partai Nasional Indonesia, melainkan telah populer pula di

berbagai organisasi lain, maka organisasi-organisasi lain pun diawasi dengan ketat melalui PID. Rapat-rapat organisasi sangat dibatasi dan PID selalu mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh organisasi-organisasi itu. Pembicaraan-pembicaraan yang dianggap menentang pemerintah baik secara lisan maupun tulisan selalu ditegur dan dikenakan sanksi yang keras.

Pada sekitar tahun 1930 itu masyarakat di Sumatera Utara telah mengenal beberapa taktik perjuangan, yaitu melalui pendidikan politik. Yang dimaksud dengan pendidikan itu ialah pertemuan-pertemuan rahasia yang dilakukan hanya oleh beberapa orang yang sangat dipercayai. Di dalam pertemuan itu yang biasanya jumlahnya sangat kecil dilakukan pembicaraan-pembicaraan politik. Memberi informasi dan meneguhkan sikap serta menentukan taktik menghadapi pengawasan yang keras serta penangkapan-penangkapan yang semakin sering dilakukan oleh PID.

Kelompok-kelompok kecil ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai lapisan dan secara formal kadang-kadang bukan anggota partai, atau malahan sering pula anggota organisasi yang kelihatannya menganut paham kooperasi. Oleh sebab itu, makin lama pengawasan makin diperluas. Bukan saja orang-orang Partai Nasional Indonesia yang diawasi, tetapi termasuk pula orang-orang dari organisasi lain, organisasi pemuda, perguruan-perguruan, organisasi agama, organisasi sosial, malahan pembicaraan-pembicaraan sehari-hari di tempat-tempat ramai sering pula tak luput dari pengawasan PID.

Menurut orang-orang tua di daerah ini yang hidup dan bergerak di bidang politik pada tahun tigapuluhan itu, maka terdapat bermacam-macam kode untuk menentukan apakah orang yang berdekatan dengan kita itu kawan atau lawan. Semacam seni berpolitik pada waktu itu terlihat pada cara bersalaman, cara menegur seseorang, cara berpakaian menunjukkan pola kehidupan dari kelompok orang-orang yang pada waktu itu disebut kaum pergerakan.

2. Undang-Undang Sekolah Swasta

Gubernur Jenderal de Jonge menyadari, bahwa sekolah-sekolah telah dimanfaatkan oleh kaum pergerakan untuk menyebarluaskan paham kemerdekaan bangsa. Pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah terutama di sekolah swasta seperti Sekolah

Taman Siswa, Sekolah-sekolah swasta lainnya telah banyak dimanfaatkan oleh guru-guru untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada generasi muda.

Memperkirakan bahaya yang akan mengancam kehidupan kaum kolonial di belakang hari, maka sekitar tahun 1931 dikeluarkanlah Ordenansi sekolah-sekolah liar (*Wilde Scholen Ordonantie*). Sebagaimana tiap ordonansi itu memakai alasan-alasan yang muluk seperti melindungi kepentingan umum, maka ordonansi sekolah liar itupun mengemukakan alasan teknis seperti alat-alat pelajaran, mutu sekolah dan mutu guru sebagai alasan di keluarkannya ordonansi itu. Tegasnya dengan ordonansi itu diwajibkan kepada sekolah-sekolah partikulir untuk memperoleh ijin untuk membuka sekolah dan disyaratkan kepada setiap guru untuk memperoleh ijin sebelum memberikan pelajaran atau mengajar.

Dalam keadaan seperti itu kelihatannya, pada mulanya kaum pergerakan di Indonesia lalai dan kurang perhatiannya. Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa pada waktu itu memberikan kritik terhadap keteledoran *Volksraad* yang sedikit pun tidak bersuara, tidak memberikan amandemen terhadap ordonansi itu, seolah-olah anggota-anggota *Volksraad* kita tidak menyadari apa yang dituju oleh ordonansi tersebut.

Di Sumatera Utara ordonansi itu telah dilaksanakan dengan ketat terutama terhadap sekolah-sekolah Taman Siswa dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di Sumatera Timur pertumbuhan Muhammadiyah telah lama tidak disenangi oleh raja-raja di daerah-daerah ini dan ulama-ulama kaum tua di daerah ini. Ordonansi ini telah dipergunakan untuk menjegal guru-guru sekolah Muhammadiyah untuk melaksanakan tugasnya di beberapa daerah, terutama di daerah *Landschap*.

Ketua Majelis Luhur Taman Siswa mendahului keputusan rapat Majelis telah mengamanatkan kepada seluruh sekolah-sekolah atau perguruan Taman Siswa agar tidak meminta surat ijin untuk membuka perguruan. Begitu pula dilarang kepada pamong untuk meminta ijin kepada pemerintah untuk mengajar. Jika sekolah-sekolah ditutup, maka diamanatkan kepada pamong-pamong untuk menjadikan rumah-rumah pamong sebagai tempat berguru, jika rumah-rumah guru ditutup, diamanatkan agar pamong mendatangi rumah-rumah murid untuk mengajar anak-anak. Jika pamong ditangkap, maka diamanatkan kepada ibu-ibu pamong untuk mengambil oper pekerjaan menjadi pamong. Jika

ibu pamong ditangkap, maka diamanatkan kepada murid-murid kelas tertinggi untuk menggantikan tugas sebagai pamong.

Demikianlah sikap perlawanan non-kooperasi secara tajam dan tegas yang diamanatkan oleh Ki Hajar itu telah melumpuhkan Ordonansi sekolah liar itu dan akhirnya tidak berarti sama sekali. Gubernur Jenderal de Jonge merasa terhina karena mengalami kegagalan dalam melaksanakan ordonansi itu. Dendam Gubernur Jenderal itu membuat politik pemerintahannya semakin keras. Sistem kepolisian yang dilakukan melalui PID semakin keras dilakukannya untuk mengawasi pergerakan kebangsaan di Indonesia.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH SUMATERA UTARA

Kegiatan ekonomi di Indonesia dipusatkan kepada sektor agraria, yaitu pertanian dan perkebunan. Produksinya merupakan bahan baku bagi industri di negeri Belanda dan di beberapa negara Eropah. Setelah Perang Dunia pertama keadaan seluruh Dunia menunjukkan tendensi menuju depresi ekonomi. Kenyataan depresi itu terasa di Indonesia pada tahun 1930 sampai tahun 1937.

Pada waktu itu hasil produksi Indonesia merosot harganya di pasaran dunia. Penjualan hasil-hasil dari Indonesia di Eropah jauh di bawah biaya produksi. Untuk mengatasi ini, maka pemerintah Belanda melakukan pembatasan produksi dari berbagai hasil pertanian khusus hasil pertanian untuk ekspor. Di Sumatera Utara sebagai daerah perkebunan, maka produksi karet, teh, kelapa sawit, tembakau dibatasi. Begitu pula hasil pertanian rakyat, seperti karet, kopi dan berbagai hasil lain seperti kopra, dan lain-lain, terpaksa dikurangi mengingat pasar dunia yang semakin sepi terhadap permintaan barang-barang tadi.

Pembatasan ini berarti berkurangnya pemasukan uang yang memberi akibat kepada keuangan negeri Belanda dan keuangan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi hal seperti itu, maka pemerintah juga terpaksa mengurangi pengeluaran dengan mengurangi pegawai, menurunkan upah. Tindakan lain yang dilakukan ialah mengurangi impor agar sejajar dengan yang juga berkurang. Keadaan ini memberi akibat semakin tinggi harga barang-barang kebutuhan penduduk sedangkan pada waktu yang sama harga barang-barang yang dihasilkan penduduk merosot.

Bagi penduduk desa yang telah lama terlibat dalam sistem

perekonomian dan peredaran uang, maka kenyataan itu memberi akibat semakin sulitnya memperoleh uang. Jumlah uang yang diperlukan penduduk guna pembayar *belasting* untuk keperluan lain-lain semakin sukar dipenuhi.

Bagi daerah Sumatra Timur yang merupakan daerah perkebunan dan sejak lama penanaman padi diabaikan, maka keperluan beras selama ini diimpor dari Birma, Vietnam dan Thailand. Beras Rangun, beras Siam dan beras Cempo adalah beras yang didatangkan dari negeri-negeri tadi. Dengan pengurangan impor timbul kesulitan bahan makanan dan berlaku catu beras bagi perkebunan dan juga bagi penduduk.

Bagi daerah Tapanuli yang selamanya adalah daerah pertanian, kesulitan dirasakan sebagai akibat depresi itu, yaitu semakin tidak sebanding penghasilan, upah dan sebagainya dengan keperluan sehari-hari. Daerah-daerah penghasil karet rakyat seperti Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias mengalami pukulan keras. Penduduk yang selama ini telah biasa memperoleh hasil yang besar dari kebun karet, sekarang kehilangan mata pencaharian. Penyadap karet yang biasanya memperoleh hasil dari usaha setiap hari sekarang terpaksa menganggur atau berusaha mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain itupun sangat sulit diperoleh.

Bagi kaum pegawai seperti kerani, guru, pegawai perusahaan, pegawai pemerintah keadaan tahun 1930 – 1937 itu merupakan saat yang mengkhawatirkan karena bukan saja penghasilan berkurang, malahan takut jika sewaktu-waktu mereka akan diberhentikan dalam rangka pengurangan pegawai yang umum berlaku pada waktu itu.

C. INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN/ORGANISASI

Setelah pemimpin-pemimpin Partai Nasional Indonesia ditangkapi dan pemerintah kolonial menjalankan politik keras terhadap gerakan non kooperasi, pemerintah kolonial menduga bahwa aksi pergerakan kebangsaan Indonesia akan reda. Kenyataannya tidak demikian, sebab setelah partai Nasional Indonesia membubarkan diri tahun 1931, maka pemimpin-pemimpin nasional membangun wadah baru. Hatta dan Syahrir membangun Pendidikan Nasional Indonesia yang terkenal dengan PNI Baru, di samping Partai Indonesia yang didirikan oleh Mr. R.M. Sartono. Setelah Sukarno ke luar dari penjara, maka Sukarno menggabung-

kan diri ke dalam Partai Indonesia. Kedua partai ini dalam perjuangannya tidak berbeda dengan Partai Nasional Indonesia dahulu. Asas non kooperasi tetap dipegang dan taktik perjuangan tetap menggalang persatuan massa dari segala lapisan dan golongan.

Akhirnya pemimpin-pemimpin PNI Baru dan Partai Indonesia ditangkapi dan kedua Partai ini lumpuh. Demikianlah gambaran perjuangan non kooperasi sampai Perang Dunia II.

Kelumpuhan organisasi-organisasi non kooperasi seperti PNI Baru dan Partindo tidaklah berarti, bahwa perjuangan bangsa Indonesia menjadi terhenti. Pemimpin-pemimpin yang selama ini bersikap kooperasi seperti Thamrin dan Sutarjo menunjukkan sikap keras melalui hak-hak bersuara di Volksraad.

Penangkapan-penangkapan yang dilakukan terhadap para pemimpin Indonesia sejak tahun 1930 bukan mengurangi semangat perjuangan, malahan membakar semangat itu semakin panas dan massa rakyat Indonesia semakin sadar akan arti perjuangan dan arti pengurbanan. Demikianlah masyarakat menilai mana pemimpin yang sebenarnya dan mana pemimpin yang pura-pura dan mereka dari golongan kooperasi ini mendapat sorotan, malahan pemimpin-pemimpin yang duduk di dalam *Volksraad* dianggap sebagai pemain sandiwara. Justru *Volksraad* menurut pandangan rakyat waktu itu terkenal dengan sebutan "komidi" Belanda.

Demikianlah para pemimpin Indonesia sesudah tahun 1930 tidak boleh kita kategorikan bedanya atas kooperasi dan non-kooperasi saja menurut duduk atau tidak duduk di dalam *Volksraad,* tetapi haruslah diperhatikan sikap pribadi masing-masing. Demikianlah misalnya Muhammad Husni Thamrin seorang anggota *Volksraad* dari Parindra, walaupun menempuh jalan pelan-pelan tetapi menyuarakan aspirasi perjuangan dan penderitaan bangsa Indonesia. Di dalam komidi tentang *poenle sanctie* di Sumatra Timur Husni Thamrin menyampaikan *verslag* tentang penderitaan kuli kontrak di kebun-kebun tembakau itu. *Verslag* itu mendapat simpati besar di Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat memboikot tembakau Deli. Perjuangan Husni Thamrin ternyata erat kaitannya atau interaksinya dengan Sejarah Sumatra Utara; justru berkat perjuangannya itulah *Poenale Sanctie* dihapuskan.

Kemudian di dalam perjuangan kelompok nasional dalam *Volksraad* bersama-sama dengan Sutarjo pada tahun 1937 melalui

Petisi Sutarjo anggota-anggota *Volksraad* dari fraksi nasional menuntut Indonesia berparlemen. Petisi itu terkenal dengan Petisi Sutarjo.

Pada tahun 1936 lahirlah Petisi Sutarjo itu yang menuntut agar kepada bangsa Indonesia diberikan suatu kedudukan yang merdeka melalui masa peralihan selama 10 tahun paling lambat untuk berdiri sendiri terlepas dari kekuasaan pemerintah Nederland. Petisi ini ditolak oleh Belanda dan dengan demikian arah pejuangan bangsa Indonesia sejak tahun 1936 itu, baik di luar *Volksraad* maupun di dalam *Volksraad* semakin mantap, yaitu menuju Indonesia merdeka.

Demikianlah setelah melihat kesamaan gerak itu dan kesamaan tujuan, maka diadakanlah satu front bersama antara partai-partai yang ada di Indonesia seperti Parindra, Gerindo, PSII, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa ke dalam Gabungan Politik Indonesia. Gabungan politik Indonesia itu lahir justru pada saat keadaan internasional menjelang Perang Dunia II dan dalam Kongres GAPI 19–20 September 1939 GAPI menuntut adanya suatu Parlemen dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Parlemen tersebut. Gerakan inilah yang dikenal dengan Gerakan Indonesia Berparlemen.

Di Sumatera Utara sejak tahun 1930 sampai Perang Dunia II situasi Pergerakan Kebangsaan sejajar dengan kegiatan-kegiatan yang kita sebut di atas. Semua perkembangan di Jawa, baik mengenai kegiatan non-kooperasi, berkumandang dan menjadi pembicaraan para pemimpin di daerah. Berbeda dengan di Jawa, maka situasi Sumatra Utara sebagai daerah kaya yang menjadi sumber ekspor dan sumber kekayaan kolonial, maka situasi kebebasan berpolitik di daerah ini tidak semudah di Jawa. Kegiatan-kegiatan politik diawasi dengan ketat. Kaum pergerakan dikucilkan dan ditakuti oleh masyarakat. Penguasa-penguasa pribumi, yaitu Sultan dan raja-raja serta kepala-kepala negeri mengawasi kegiatan politik dengan bekerjasama dengan PID. Berpolitik adalah jahat, melawan, membangkang dan kejahatan itu dipandang tidak cocok bagi alam pikiran masyarakat kita.

Oleh sebab itu maka kegiatan politik itu terbatas adanya di kalangan tertentu. Tidak sampai kepada masyarakat desa dan hanya ada di kota-kota saja. Itupun terbatas pula pada golongan yang hidup mereka tidak terikat kepada gaji atau upah dari Gubernemen atau dari *onderneming.* Pemerintah mengawasi dengan

ketat orang-orang yang berafiliasi kepada partai dan organisasi, begitu pula perusahaan-perusahaan melakukan menyaringan yang ketat terhadap orang-orang seperti itu.

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda

Menjelang keruntuhan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, yaitu sekitar tahun 1929 – 1941 beberapa hal yang perlu kita kemukakan tentang sikap pemerintah kolonial ialah:

Tidak ada perubahan yang penting dalam sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia menghadapi situasi perang yang sedang mengancam bangsa Belanda di Eropah yaitu dari Jerman dan di Asia yaitu dari Jepang. Keadaan itu dapat kita lihat, bahwa tuntutan-tuntutan pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mendapatkan perubahan status pemerintahan di Indonesia seperti tuntutan Indonesia berparlemen tidak mendapat perhatian Belanda. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditangkap atau diasingkan tetap di dalam tahanan dan tidak dusahakan kerjasama antara bangsa Indonesia dengan Belanda dalam mempertahankan Indonesia dari ancaman fasisme Jepang. Walaupun pemimpin-pemimpin ada yang mengemukakan sikap ingin bekerjasama, namun usaha membentuk kekuatan bersama itu tidak ada kenyataannya.

Usaha pemerintah Belanda antaranya membantuk Komisi Visman untuk mengetahui keinginan rakyat Indonesia ternyata terlambat bekerja. Begitu juga kedatangan Menteri Welter dan Kleffens ke Indonesia tidak memberikan perubahan yang diharapkan. Keinginan bekerjasama dalam bentuk milisi yang diminta Belanda pada waktu itu malahan mendapat tantangan dari nasionalis di dalam *Volksraad,* yaitu oleh Sutarjo dan Thamrin, karena katanya untuk mengambil putusan seperti itu perlu terlebih dahulu ada parlemen yang sebenarnya yang dibentuk secara demokratis untuk menyalurkan keinginan rakyat.

Sikap pemerintah Kolonial Belanda menjelang Perang Dunia kedua membosankan dan mengecewakan para pemimpin Indonesia. Dalam hal seperti itu Belanda tidak mungkin dapat menarik simpati bangsa Indonesia dalam menghadapi perang. Sutarjo menghendaki kemenangan dalam masa damai bukan kemenangan dalam

masa perang. Tegasnya pemimpin-pemimpin Indonesia tidak rela membantu Belanda, jika Belanda tidak lebih dahulu memberikan status kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

2. Keadaan Masyarakat

Sesudah zaman malaise yaitu sesudah tahun 1937, keadaan ekonomi kembali baik. Keadaan seperti itu berpengaruh juga dalam hubungan sosial. Pendidikan semakin maju dan di samping itu makin banyak orang Indonesia memperoleh kesempatan belajar baik di dalam maupun di luar negeri. Sekolah-sekolah Gubernemen maupun sekolah-sekolah swasta semakin banyak. Di Medan saja pada masa menjelang perang Dunia II terdapat HBS, Mulo, dan beberapa HIS. Di samping sekolah Gubernemen terdapat banyak sekolah swasta seperti Taman Siswa Ivorno, Tampis, Perguruan Kita, *Jousua Institut* dan lain-lain. Hampir pada setiap kota di Sumatra Utara telah ada sekolah HIS. Juga ada sekolah Mulo atau sekolah perantara *Schakel* yang perlu ditempuh oleh murid-murid dari sekolah berbahasa Melayu sebelum memasuki MULO.

Dalam lapangan hidup budaya dan agama tidak ada perubahan penting pada masa menjelang perang itu. Kegiatan seni budaya baik yang bersifat tradisional maupun bersifat modern telah berkembang dengan pesat. Yang dimaksud dengan kesenian modern itu ialah seperti sandiwara, orkes, film, *club-club*, yang dengan mudah dapat ditandai di dalamnya pengaruh Barat.

Di dalam kehidupan beragama masing-masing agama yang berkembang di Sumatra Utara, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, menjelang Perang Dunia II telah ada pula sekte-sekte lain berkembang di Sumatra Utara seperti Gereja *Methodist, Seven Day Adventist,* yang dipelopori oleh Missi-missi dari Amerika Serikat. Bala Keselamatan merupakan ordo yang di samping bergerak di lapangan rokhani juga banyak bergerak di lapangan pendidikan dan sosial.

3. Sikap Masyarakat Terhadap Pemerintah Hindia Belanda

Sehubungan dengan sikap pemerintah Hindia Belanda yang tidak memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengubah nasibnya sebagai bangsa jajahan, maka pemimpin-pemimpin Indonesia bersikap tidak simpati kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini masyarakat luas yang tidak mendapat dorongan atau saran untuk membantu Belanda dalam

perang, juga bersikap masa bodoh. Secara diam-diam pemimpin telah menyuarakan rasa tidak puas, walaupun orang belum mengerti tentang apa yang akan dituju. Namun demikian sedikit banyak orang sudah mengetahui akan situasi internasional, misalnya dengan adanya perang di Eropah. Hal itu membuat situasi dingin antara orang Belanda dengan orang Indonesia.

4. Keadaan Pemerintah Hindia Belanda Pada Saat Terakhir Di Sumatra Utara

Pada tanggal 1 September 1939 pecah Perang Dunia II di Eropah. Negeri Belanda diduduki Jerman pada tanggal 10 Mei 1940. Dalam keadaan demikian Ratu Wihelmina masih sempat membuat janji akan adanya perubahan. Tetapi hal itu tidak ada artinya lagi bagi pemimpin-pemimpin kita dan malah banyak yang mencemoohkan. Secara struktural tidak ada perubahan pemerintahan Hindia Belanda di daerah ini sesudah pecah Perang itu. Hanya saja kegiatan-kegiatan baru dilakukan, seperti *Stadswacht,* yaitu latihan-latihan militer yang diberikan kepada beberapa pemuda. Pada mulanya *Stadswacht* itu dipersiapkan untuk penjagaan dan pertahanan kota tetapi kenyataannya, kelak anggota-anggotanya hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan setelah pasukan-pasukan Belanda diam-diam melarikan diri. Ketika menyadari hal itu dan Jepang masuk maka sebagian *Stadswacht* yang tidak sempat ikut melarikan diri itu pulang ke kampung masing-masing.

Latihan-latihan lain ialah penerangan tentang bahasa udara. Dibagi-bagikan kepada penduduk alat-alat untuk mencegah kaget, tetapi hanya pada kota-kota. Namun karena penduduk memang belum pernah mendengar dan merasakan perang hal itu tak pernah mendapat perhatian yang serius. Jika ada kapal terbang maka diperintahkan masuk lubang perlindungan. Tetapi hal yang paling menarik yaitu beberapa waktu sebelum Jepang masuk ke beberapa kota di Sumatra Utara, maka rumah-rumah sepanjang jalan diperintahkan supaya dikosongkan, malahan dinding depannya disuruh rombak untuk memperlihatkan kepada Jepang bahwa daerah itu dipertahankan.

Pada tanggal 8 Desember 1941 pecahlah Perang Pasifik. Dengan tempo cepat daerah-daerah di Asia Tenggara diduduki Jepang. Kekuatan ABSD ternyata tidak mampu menahan serangan Jepang. Pada tanggal 13 Maret 1942 Jepang telah sampai ke

Medan, dan pasukan Belanda mengundurkan diri ke arah pedalaman dan mencoba bertahan di Gunung Setan dekat Kutacane. Di sanalah terjadi penyerahan Belanda kepada Jepang dan pasukan-pasukan Belanda ditawan di beberapa tempat di Sumatra Utara.

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

1. Propaganda Jepang yang terasa di Daerah Sumatera Utara

Menjelang kedatangan pasukan pendudukan Jepang ke Sumatra Utara, maka di daerah ini telah tersiar kabar tentang maksud kedatangan itu. Kabar-kabar tersebut didengar oleh pemimpin-pemimpin di daerah ini melalui radio Jepang. Hampir tiap malam radio Jepang menyiarkan berita kemenangan Jepang dalam bahasa Indonesia dan tiap akhir siaran itu ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Pada tiap kesempatan siaran itu, selalu ditekankan, bahwa tujuan kedatangan Jepang ialah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Digambarkan tentang masa depan yang gemilang dan berakhirnya masa silam yang menyedihkan bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu di Sumatra Utara dikenal juga barisan mata-mata Jepang yang terkenal dengan Barisan F (Fujiwara). Barisan itu bertugas untuk menyambut kedatangan Bala Tentara Jepang. Untuk itu dipersiapkan pandangan masyarakat yang memihak kepada Jepang.

Toko-toko Jepang menjual barang-barang dengan harga murah dan sering pula memberi hadiah. Kegiatan itu dimaksudkan untuk memikat hati rakyat dan supaya rakyat memperoleh kesan, bahwa jika Jepang nanti telah sampai di Sumatera Utara, maka kemakmuran segera akan tercapai.

Sementara itu di kalangan pemimpin Indonesia sendiri di daerah ini terdapat pula sikap yang mengharapkan kedatangan Jepang itu sebagai suatu saat yang baik bagi perubahan kehidupan politik. Walaupun ada di antara pemimpin di daerah ini yang sadar, bahwa kedatangan Jepang itu tidak akan membawa perubahan penting, malahan akan membahayakan, tetapi kekecewaan mereka akan sikap pemerintah Belanda, menyebabkan mereka lebih senang untuk tidak berpartisipasi kepada Belanda. Sekurangnya mereka pasif dan ada juga di antara mereka yang aktif membantu propaganda Jepang. Hal itu ternyata telah

memberi kesan yang sangat dalam kepada masyarakat di daerah ini. Kedatangan Jepang di mana-mana disambut dengan meriah. Malahan ada kejadian bahwa orang Belanda yang melarikan diri dari kota ke desa diseret penduduk dan diserahkan kepada tentara Jepang. Rakyat senang memberikan bantuan kepada pasukan Jepang dan merasa apa yang dijanjikan itu benar-benar telah ditepati.

Kedatangan pasukan Jepang disambut sebagai pahlawan yang datang dari seberang samudera yang jauh, dari negara rahmat yang maha suci, menjujung cita-cita amat murni yaitu untuk berjumpa dengan saudaranya bangsa Indonesia. Demikianlah kumandang semangat yang dituangkan oleh propaganda Jepang sebelum datang ke daerah ini. Mereka selalu mengatakan bahwa Jepang dan Indonesia sama-sama bangsa Asia. Sama-sama sesaudara dan Jepang sebagai saudara tua melaksanakan kewajiban memberikan bantuan kepada bangsa-bangsa lain di Asia. Hal itulah yang menjadi inti dari Gerakan Tiga A yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Cahaya Asia.

2. Waktu Kedatangan Pasukan Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941 Tenno Heika mengumumkan perang kepada Inggris dan Amerika. Serentak dengan itu, maka pangkalan armada Amerika di Pearl Harbour dihancurkan Jepang. Setelah armada Amerika itu dilumpuhkan, maka besoknya tanggal 9 Desember pesawat-pesawat Jepang menggempur Singapura. pusat pertahanan Inggris di Asia Tenggara. Serangan yang dilakukan besoknya, menyebabkan kapal perang *Prince of Wales* dan *Repulse* yang dibanggakan Inggris itu tenggelam. Dengan demikian terbukalah di Semenanjung Melayu dan Sumatra Timur.

Pada tanggal 13 Maret 1942 bala tentara Jepang memasuki Medan setelah mereka malamnya mendarat di Batu Bara, suatu kota kecil di pantai timur kira-kira daerah yang terletak antara Tanjung Balai dengan Belawan.

Beberapa hari sebelum itu pesawat-pesawat Jepang telah membom beberapa tempat di Sumatra Utara. Mulai serangan itu dengan tujuan lapangan udara Polonia, kemudian pelabuhan Belawan dan Tanjung Balai. Serangan-serangan udara Jepang itu benar-benar berkesan di hati rakyat karena hal seperti itu belum pernah dialami. Bagi penduduk kota Medan letusan bom adalah suatu yang sangat dhasyat, karena letusan yang pernah mereka

dengar seperti letusan meriam tidak sekuat bom itu.

Penduduk merasa bahwa keadaan telah berubah. Dan setelah melihat bahwa pasukan Belanda atau meriam-meriam Belanda tidak dapat mematahkan serangan udara itu, dengan sendirinya sejak waktu itu rakyat sudah tahu bahwa Belanda tidak akan berdaya menghadapi Jepang. Lebih-lebih lagi, ketika orang-orang Indonesia yang bertugas di kantor-kantor Belanda melihat kepanikan di kalangan orang-orang Belanda.

Pasukan Jepang yang sampai di Medan itu memakai sepeda. Masjid raya mereka pakai sebagai benteng pertama. Orang-orang yang berpergian sekitar mesjid itu pada pagi hari terkejut melihat tentara Jepang telah berdiri di persimpangan jalan Mesjid tersebut. Paginya penduduk telah ramai memenuhi pinggir jalan raya menyambut barisan pasukan Jepang atau lebih tepat barisan sepeda Jepang menuju kota Medan. Rakyat yang berkerumunan itu melambai-lambaikan tangan dan ada pula yang telah memberi semangat dan Jepang melihat dan bahwa propagandanya telah meresap ke dalam hati rakyat di daerah ini.

Dari Medan pasukan Jepang menyebar ke berbagai kota lain di Sumatra Utara dengan serangan kilat. Hampir-hampir di tiap tempat tidak ada perlawanan melahan selalu mendapat sambutan hangat dari rakyat.

Pertahanan Belanda yang agak berarti hanyalah di Gunung Setan yaitu di Kutacane, kemudian dekat Porsea dan si Pittu-pittu dekat Siborong-borong. Di Porsea terjadi pertempuran untuk menggagalkan Belanda menghancurkan jembatan Porsea yang sangat penting artinya bagi kelancaran pasukan Jepang ke Selatan.

Pasukan Jepang ke Porsea melalui danau Toba dengan perahu-perahu dan dengan cepat mempergunakan tenaga penduduk untuk menguasai jembatan Porsea yang penting itu. Pasukan *Jibaku* Jepang telah menggagalkan usaha pendinamitan jembatan itu. Sebenarnya maksud Belanda mendinamit jembatan itu ialah untuk memberi waktu kepada orang-orang Belanda di daerah itu menyelamatkan diri, tetapi setelah mereka gagal mendinamit jembatan tersebut, mereka buyar dan lari ke kampung-kampung. Di situlah kita lihat penduduk yang banyak menyerahkan Belanda itu kepada Jepang dan pada hari itu juga orang-orang Belanda itu diikat, ditusuk dan ditembak lalu dipersaksikan oleh rakyat yang menyerahkannya itu.

Dalam tempo yang singkat daerah Sumatra Utara jatuh ke

tangan Jepang. Dan dalam tempo yang singkat pula Jepang menegakkan kekuasaannya memelihara keamanan dan dengan kekerasan menindas kegiatan penduduk yang mencoba mencari kesempatan. Cara-cara yang dipakai Jepang untuk menunjukkan kekuasaannya itu sangat sederhana sekali. Lima orang pemuda Cina di Medan dipotong lehernya, lalu dideretkan kepalanya di tengah jalan. Kemudian disampaikan kepada orang-orang, bahwa siapa yang tidak mengembalikan harta benda Belanda yang dirampas akan dipotong seperti itu pula. Maka dengan seketika itu juga, penduduk meletakkan barang-barang rampasan dari Belanda itu pada malam hari di sepanjang jalan. Begitulah pada tiap kota yang diduduki Jepang, mereka memperlihatkan kekuasaan dan dengan demikian mereka menakuti orang-orang untuk berbuat jahat.

3. Sikap Jepang Terhadap Aparatur Pemerintah Hindia Belanda

Pemerintah Jepang di Tokyo telah mempunyai rencana tentang bentuk pemerintah di Indonesia sesudah negeri ini didudukinya. Untuk itulah pemerintah Jepang di Tokyo telah menyediakan tenaga-tenaga ahli yang akan mengatur pemerintah di Indonesia. Sejumlah ahli dari Jepang yang dikirim setelah Belanda menyerah, ternyata tidak pernah sampai di Indonesia. Menurut keterangan kapal yang membawa tenaga-tenaga ahli itu kena torpedo.

Sama halnya dengan di daerah lain di Indonesia, maka pasukan Jepang menginternir orang-orang Belanda, Belanda Indo, Ambon dan Menado. Mereka ini dikumpulkan pada beberapa tempat di Sumatra Utara. Bekas-bekas tentara Belanda di pekerjakan di jalan antara Sumatra Utara dengan Aceh Tenggara. Tawanan-tawanan Belanda diperlakukan dengan keras, dan untuk pertama sekali penduduk melihat orang-orang kulit putih yang selama ini dipertuan hidupnya sangat menderita dan sangat dihinakan.

Tawanan-tawanan Sipil Belanda dan wanita ditempatkan di sekitar Medan yaitu di kamp tawanan Gelugur dan Helvetia. Setiap orang yang lewat di depan kamp tawanan yang berpagar kawat berduri itu dapat melihat ke dalam, memperhatikan keadaan mereka yang sangat menyedihkan. Sebagian lagi tawanan Belanda itu dibawa ke Labuhan Batu. Di daerah ini sama saja halnya dengan tawanan di tempat lain. Beberapa tenaga dokter

dan tenaga teknis Belanda ada yang dipakai untuk beberapa waktu, tetapi setelah keadaan perang Asia Timur Raya berubah ke arah kekalahan Jepang, maka orang-orang inipun ditawan pula.

Sementara itu bagai pegawai-pegawai Belanda yang berasal dari bangsa Indonesia, keadaan ini membawa perubahan penting. Mereka inilah yang dipakai oleh Jepang untuk mengerjakan segala sesuatu yang perlu bagi administrasi pemerintahannya di Indonesia. Mereka dinaikkan tingkatnya dari kedudukan semasa Belanda setingkat atau lebih. Malahan ada yang dinaikkan jabatan beberapa tingkat dari jabatan semasa Belanda di Indonesia. Secara tidak langsung kesempatan yang diberikan di zaman Jepang itu telah besar pengaruhnya kepada kepercayaan diri sendiri bagi bangsa Indonesia. Mereka semakin yakin, bahwa jika diberi kesempatan, maka mereka pun mampu menyelenggarakan tugas kenegaraan. Hal inipun telah membangun rasa nasional yang besar. Justru ketika urusan-urusan administrasi itu diserahkan kepada bangsa Indonesia, para pegawai Indonesia, sering dipimpin oleh orang-orang Jepang yang ternyata kurang mampu dalam segala urusan administrasi pemerintahan. Kenyataan itu telah menyadarkan bangsa kita, bahwa bangsa yang lebih bodoh itu tak perlu berada di Indonesia dan kita dapat mengatur bangsa kita sendiri.

4. Sikap Jepang Terhadap Bangsa Indonesia

Pada mulanya Jepang memperlihatkan sikap bersahabat. Tetapi hal itu tidak lama. Segera setelah Bala Tentara Jepang dapat menguasai keadaan di Sumatra Utara, maka segala hal yang pada mulanya dibenarkan, seperti mengibarkan Sang Merah Putih, melagukan Indonesia Raya sekarang dilarang. Rapat umum di Medan beberapa hari setelah Jepang berkuasa menyampaikan keputusan pemerintah Jepang yang pada asasnya menjadi undang-undang Bala Tentara Dai Nippon. Pada pokoknya dikatakan, karena Bala Tentara Dai Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seturunan dengan bangsa Nippon, dan juga hendak mendirikan ketenteraman yang teguh untuk hidup dan makmur bersama-sama rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Raya bersama-sama, maka dari itu Bala Tentara Dai Nippon melaksanakan pemerintahan militer untuk sementara waktu. Bagi rakyat pengumuman seperti itu berarti bahwa segala impian sekarang telah hilang. Dalam rapat umum di Medan dilarang membawa bendera Merah Putih dan di-

larang melagukan Indonesia Raya. Dengan alasan persatuan Asia Raya dan dengan alasan untuk memenangkan perang melawan Inggris dan Amerika, maka cukup satu saja bendera yaitu bendera *Hino Maru* dan Lagu *Kimigayo*.

Menurut cerita orang-orang yang mengalami rapat umum itu, maka banyak pemimpin meneteskan air mata dalam rapat tersebut. Mereka telah sadar, apa makna dari segala pengumuman itu dan lebih-lebih setelah disuruh *Seikere* ke Matahari Terbit menyembah *Tenno Heika*, jelas apa yang dikehendaki Jepang dari Rakyat Indonesia.

Dalam lapangan ekonomi, pemerintah Jepang bersikap keras untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kemenangan perang. Bagi persiapan itu, maka penduduk diserukan memproduksi bahan makanan dan dilatih untuk menghemat makanan dan mesti tahan lapar. Penderitaan zaman Jepang bukan saja disebabkan kurangnya bahan makanan dan pakaian, tetapi lebih ditentukan oleh sikap bangsa Jepang itu sendiri terhadap bangsa Indonesia.

Dengan kedok bergotong royong bangsa Indonesia dipaksa bekerja bersama-sama mengerjakan berbagai tugas berat. Di mana-mana di tiap kampung penduduk dipaksa bekerja untuk gotong royong. Penduduk kota yang tidak bekerja sebagai pegawai dan petugas di tangsi militer dipaksa pergi ke kampung-kampung untuk bekerja di ladang atau di sawah. Bagi kota Medan, penduduk kota dipaksa pindah ke daerah sekitarnya. Daerah sekitar Medan itu adalah daerah perkebunan dan penduduk menggarap tanah perkebunan itu untuk dijadikan tanah pertanian. Banyak padi, jagung hasil penduduk di daerah Sumatra Timur ini dikumpulkan dan dibawa oleh Jepang untuk makanan pasukan atau untuk persiapan. Di Tapanuli penyerahan padi kepada Jepang itu terkenal dengan sistem *karcis belau*. Dengan sistem ini ditentukan berapa jumlah yang wajib diserahkan tiap-tiap petani ke gudang Jepang sehabis panen. Tidak saja padi, juga barang-barang lain seperti ternak, atau sepeda, apa yang dianggap perlu tidak boleh ditahan dan harus dikurbankan untuk perang Asia Timur Raya.

5. Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Jepang

Semua sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia itu mendatangkan sakit hati penduduk. Akhirnya penduduk benci kepada Jepang, tetapi tidak berani mengadakan perlawanan. Perlawanan itu tak mungkin dilakukan, karena Jepang telah menahan kaki

tangannya di mana-mana, malahan di antara penduduk sendiri saling curiga. *Komico* adalah lembaga pemerintahan Jepang yang paling rendah untuk mengatur hubungan antara Jepang dan penduduk. Sementara itu Jepang memilih orang-orang yang dianggapnya dapat mengerjakan sesuatu. Lalu orang-orang itu ditugaskan dengan tidak perlu minta persetujuan lebih dulu. Sikap Jepang itu menimbulkan rasa takut, rasa dendam dan benci.

Walaupun demikian sikap keras Jepang selalu saja ada perlawanan terhadap semua peraturan. Orang terpaksa melawan peraturan itu, kadang-kadang karena tidak tahan menderita. Makanan sangat sulit. Walaupun dilarang keras membawa makanan dari satu tempat ke tempat lain, namun karena terpaksa orang melakukan juga walaupun konsekwensinya sangat berat. Dapat dihukum mati.

Perlawanan yang lain dilakukan oleh pemuda-pemuda seperti perlawanan *Gyugun* di Pematang Siantar yang dipimpin oleh Hotman Sitompul, perlawanan *Heiho* di Belawan dan perlawanan lain yang kebanyakan dilakukan sendiri-sendiri. Semuanya itu menunjukkan, bahwa walaupun keadaan sangat sulit, namun sikap perlawanan itu masih ada dalam batin bangsa kita. Rasa kebangsaan, paksaan kehidupan, telah menempa hati nurani bangsa kita selama pendudukan Jepang itu. Inilah modal yang paling besar untuk merebut kekuasaan dari Jepang setelah Bala Tentara Jepang menyerah kepada Sekutu. Ini pulalah modal yang utama untuk mempertahankan Proklamasi di daerah ini setelah kedatangan Sekutu dan Nica ke daerah Sumatra Utara.

DAFTAR BACAAN

Alamsyah, St. Rais, *10 orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Firma Bintang Mas, Djakarta, 1952.

Alisyahbana SH., Prof. S. Takdir, *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat Dari Jurusan Nilai-Nilai*, Yayasan Idayu, jakarta, 1975.

Amelz, *H.O.S. Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya*, Bulan Bintang, Djakarta.

Anderson, John, *Mission To The East Coast of Sumatera In 1823*, Oxford University Press, London, 1971.

Arsjad, Mohammad, *Thabal Mahkota Negeri Asahan*, Penerbit Mohammad Arsjad, Tandjungbalai, 1953.

Brodjonegoro, Sutedjo, *Sedjarah Pendidikan Indonesia*, Jokjakarta, 1956.

Berkhof, Dr. H.; Dr. I.H. Enklaar, *Sejarah Gereja*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta 1962.

Biegman, G.j.F.,*Hikajat Tanah Hindia*, Cetakan V., Percetakan Gouvernement, Betawi, 1915.

Biro Sejarah Prima, *Medan Area mengisi Proklamasi*, jilid I, Badan Musjawarah pejuang Republik Indonesia, Medan.

Boeke, J.H., *Batas-batas Dari Masyarakat Pedesaan Indonesia*, Bhratara, Jakarta, 1971.

Dahm, Bernhard, P.S. Falla, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, Pall Mali Press, London, 1917.

Damste, Dr. O. Jilderda, Diterjemahkan oleh J.P. Siboroetorop, *Nederland–Indonesia*, Noordhoff Kloff NV., Batavia C., 1949.

Dewantara, Ki Hajar, *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*, N.V. Pustaka & Penerbit Endang, Djakarta, 1952.

Dhaniswara, *Dokumentasi Sewindu*, Yayasan Pendidikan Kejuruan, Jakarta, 1953.

Djaja, Tamar, *Pusaka Indonesia*, Bulan Bintang, Djakarta, 1966.

Graaf, H.J., de *Geschiedenis van Indonesia,* s. Gravenhage, Bandung, 1949.

Gunseinkaubu, *Boekoe Pengoempoelan Oendang-Oendang,* Kakumin Tosyo Kyoku (BP), Djakarta.

Gunther, John, *Inside Asia,* Harper & Brothers, New York and London, 1942.

Hall, D.G.E., *A History of South–East Asia,* Macmillan & Co. Ltd., London, ST Martins Press, New York, 1960.

Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup,* jilid I dan II, Bulan Bintang, Djakarta,

Ayahku, Djajamurni, Djakarta, 1967.

Dari Perbendaharaan lama, Firma Madju, Medan, 1963.

Hardjono, A.M., *Dokumentasi Perdjuangan Pamuda Indonesia Islamiyah,* Medan, 1950.

Husny, T.M. Lah, *Lintasan Sejarah Peradaban dan* ***Pen****duduk-duduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur,* ***1612*** 1950, B.P. Husny, Medan, 1975.

Ibrahim Thalib, *Jiwa Juang Bangsa Indonesia,* Mahabudi, Jakarta, 1975.

Junus, Mahmud, *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Pustaka Muhammadiyah, Djakarta, 1960.

Kartini, R.A., ; Armijn Pane, *Habis gelap terbitlah terang,* Balai Pustaka, Djakarta, 1962.

Kartodirdjo, Dr. A. Sartono, *"Struktur Sosial Dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial". Lembaran Sejarah* No. 4, Tahun 1969, Fakultas Sastra & Kebudayaan, Universitas Gajahmada, Jokjakarta.

"Segi-segi Struktural Historiografie Indonesia", Lembaran Sejarah No. 3 Tahun 1968, Fakultas Sastra & Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

., *"Beberapa Pasal dari Historiografie Indonesia, Lembaran Sedjarah* No. 2, Fakultas Sastra & Kebudayaan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1968.

Beberapa persoalan sekitar sejarah Indonesia, Fakultas Sastra Gama, Yogyakarta, 1960.

, Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad ke-19–20, *Lembaran Sejarah,* No. 1 1967 Fakultas Sastra & Kebudayaan Universitas Gajah mada, Jokjakarta, 1967.

Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia, Balai Pembinaan Administrasi, Universitas Gajah mada, Jokjakarta, 1964.

Kasim, Moh., Oeyeng S. Gana, *Zaman dahulu, sekarang – dan . . . jang akan datang,* N.V. Ganaco Bandung– Djakarta- Amsterdam, 1955.

Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara,* 1963.

Lembaga Arsip Nasional, *Arsip Nasional RI, No. 5,* Jakarta, 1973.

Margono, *Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional* (1908 – 1945), Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.

Meuraxa, Dada, *Sejarah Hari Jadinya Kota Medan 1 Juli 1590,* Penerbit Sastrawan, Medan, 1975.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan gerakan,* Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Natsir. M., D.P. Sati Alimin, *Capita Selecta, 2,* Pustaka Pendis, Djakarta, 1957.

Panitia Almanak Nasional Sumatera, *Alamanak Sumatera* Medan, 1969.

Panitia Besar Peringatan, *Peringatan 30 Tahun Muhammadiyah Di Daerah Sumatera Timur,* Luhur, Medan 1957.

Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah Medan, *Al Djamijatul Washlijah 1/2 Abad,* Medan, 1956.

Pringgodigdo, SH., A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia,* P.T. Dian Rakyat, Djakarta, 1970.

Prijono, *Glimpses of Indonesian Education And Culture,* P.N. Balai Pustaka, Djakarta, 1964.

Purba, M.D., Let. Kol. Pens., *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun,* Penerbit M.D. Purba, Medan, 1977.

Pustaka Al Washlijah, *21 Tahun Al Dj. Washlijah,* Pustaka Al Washlijah, Medan, 1951.

Rickevarsel, L.Van, (Dimelajukan oleh J.Soejono & Sadiran), *Kitab Riwajat Kepoelauan Hindia Timoer,* J.B. Wolters, Groningen, 1928.

Rugers, Ir., S.J., *Indonesia,* Pegasus, Amsterdam,

Sandra, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia,* P.T. Pustaka Rakyat, Djakarta, 1961.

Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies,* Sumur Bandung, N.V. miy Vorkink van Hoeve, Bandung, 1960.

Schrieke, B.J.O., *Penguasa-penguasa Pribumi,* Bhratara, Jakarta, 1974.

Setyabuddhi, Dr., DD, Almarhum, *Sedjarah Indonesia,* N.V. Masa Baru, Bandung.

Siahaan, BA, N., *Sejarah Kebudayaan Batak,* Cetakan I, CV. Napitupulu & Sons, Medan, 1964.

Sianipar, Dr., F.H., *Samuel Munson–Henry Lyman,* Seksi Zending HKBP, Pematang Siantar, 1971.

Sitorus, L.M., *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia,* Tjetakan II, Pustaka Rakyat, NV., Djakarta, 1951.

Slametmujana, Prof. Dr., *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia,* Djilid II PN. Balai Pustaka, Djakarta, 1969.

Soedjatmoko, *An Introudction To Indonesian Historiography,* Press, New York, 1965.

Supomo, Dr.R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,* Noor Kemala, Djakarta, 1960.

Tirtoprodjo, Susanto, Drs., SH., *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia,* P.T. Pembangunan, Djakarta, 1970.

Van Leur, J.C., *Indonesian Trade and Society,* Sumur Bandung, NV. Mij Vorkink–van Hoeve, Bandung, 1960.

Yayasan Museum Simalungun, Pamatang Siantar, 1974, *Seminar Kebudayaan Simalungun se Indonesia,* (pertama).

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *45 Tahun Sumpah Pemuda,* PT. Gunung Agung, Jakarta, 1974.

Harian *Mimbar Umum,* Medan, Minggu, 7 Agustus 1977.

Sinar Indonesia Baru, Medan, Sabtu, 13, 20, 27, Maret 1976.

Medan, Sabtu, 7, 14, 21, 28 Februari, 1976.

000717.2
G3.2

PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA